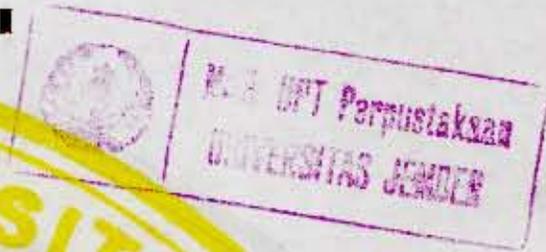


**PERUBAHAN ORIENTASI POLITIK LUAR NEGERI  
TURKI TERHADAP AMERIKA SERIKAT  
( PADA MASA PEMERINTAHAN PM. NECMETTIN ERBAKAN )**

**SKRIPSI**



Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian  
guna memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu I (S-1)  
Jurusan Ilmu Hubungan Internasional  
Pada  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Jember

Asa	: Hadith	S
Pembelian		Klass
Terima	: Tgl. 07 JUL 2003	327.561
No. Induk	SRS	wul
		p

Oleh :

*Dewi Retno Wulandari*  
980910101100

Pembimbing :

*Drs. Achmad Habibullah MSi*  
NIP. 131953242

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER  
2003

**LEMBAR PERNYATAAN**

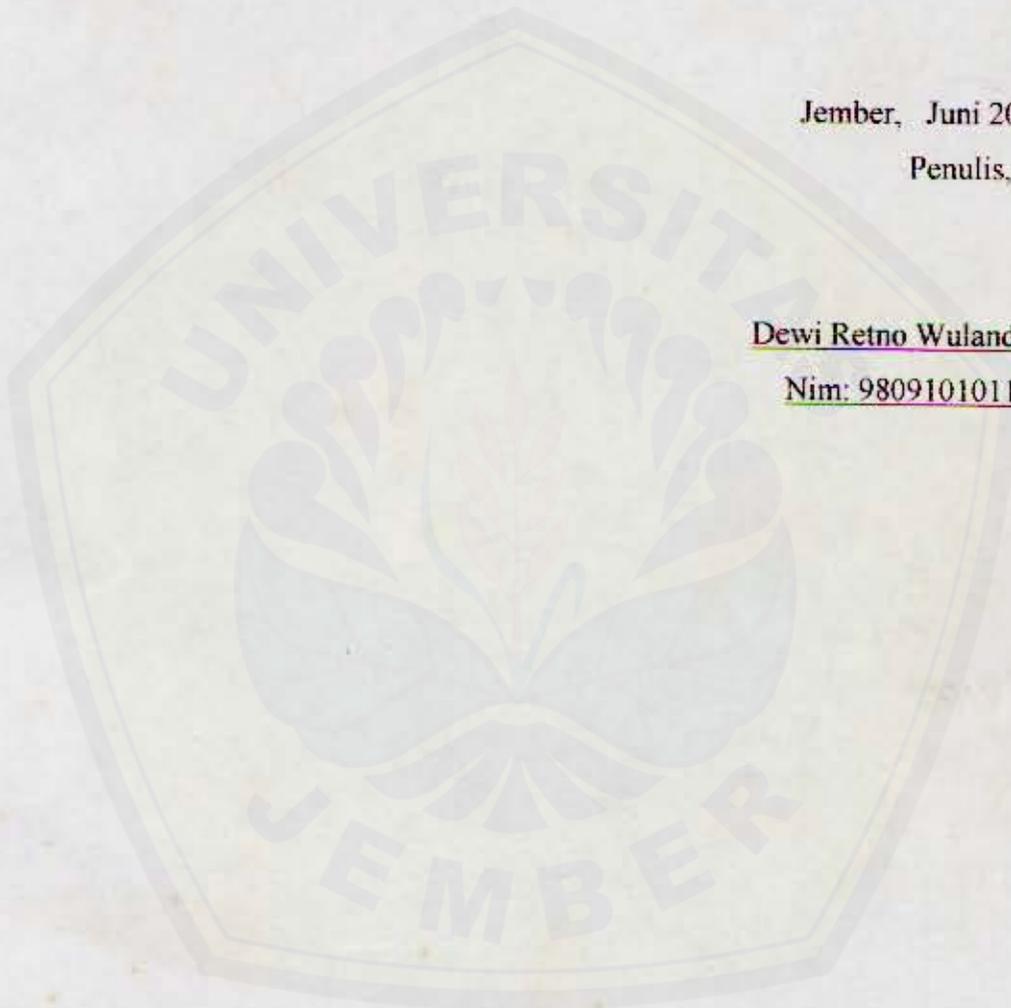
Saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya asli saya dan semua bahan yang digunakan berasal dari sumber yang sah dan diketahui.

Jember, Juni 2003

Penulis,

Dewi Retno Wulandari

Nim: 980910101100



## PENGESAHAN

Diterima dan dipertahankan di depan panitia penguji skripsi  
Guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S-1)  
Jurusan Ilmu Hubungan Internasional  
Program Studi Hubungan Internasional

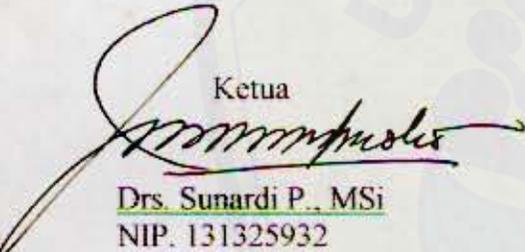
Pada

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Jember

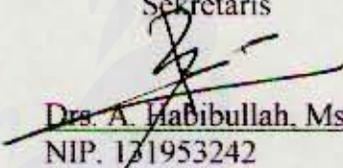
Pada hari : Rabu  
Tanggal : 25 Juni 2003  
Pukul : 09.00-11.00

Panitia Penguji

Ketua

  
Drs. Sunardi P., MSi  
NIP. 131325932

Sekretaris

  
Drs. A. Habibullah, Msi  
NIP. 131953242

Susunan Keanggotaan Panitia Penguji

1. Drs. Sunardi P., Msi
2. Drs. A. Habibullah, Msi
3. Drs. Bagus Sigit S.

Mengetahui  
Dekan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

  
Drs. H. Moch. Toerki  
NIP. 130524832

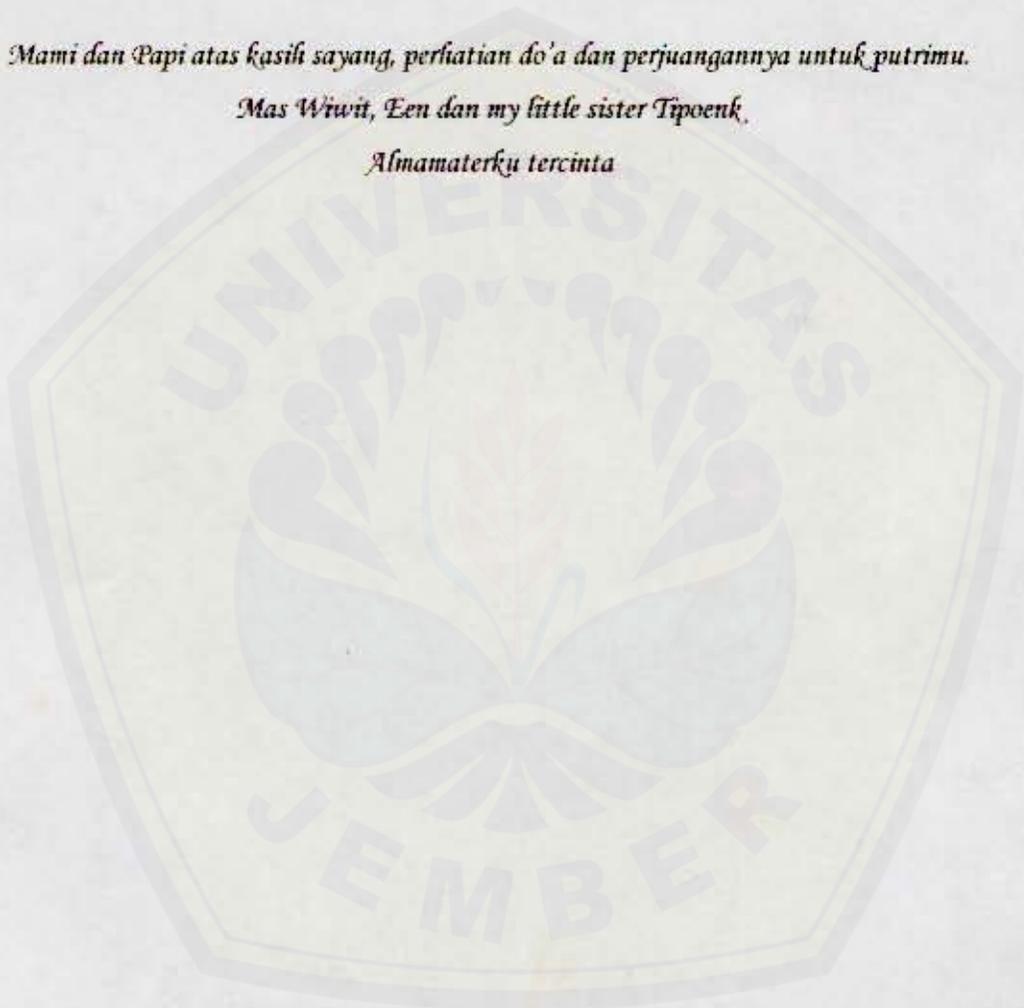
*PERSEMBAHAN*

*Skripsi ini kusembahkan dengan penuh cinta dan kasih kepada:*

*Mami dan Papi atas kasih sayang, perhatian do'a dan perjuangannya untuk putrimu.*

*Mas Wriwit, Ean dan my little sister Tipoenk,*

*Almamaterku tercinta*



## MOTTO

*"Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada dalam diri mereka sendiri."*

*(QS Ar-Ra'd: 11)*

*"Tidak ada kemajuan tanpa perubahan. Orang-orang yang tidak bisa mengubah pikirannya tidak akan mengubah apapun."*

*(George Bernard Shaw)*

*"Orang-orang yang tidak pernah mengubah pendapat-pendapatnya dan tidak pernah mengoreksi kesalahannya tidak akan lebih bijaksana di hari esok dibanding hari ini."*

*(Tyron Edwards)*

## KATA PENGANTAR

Akhirnya syukur Alhamdulillah penulis ucapkan, dengan terselesaikannya skripsi ini sebagai hasil kerja keras dan dengan Ridhonya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Perubahan Orientasi Politik Luar Negeri Turki Terhadap Amerika Serikat pada masa Pemerintahan Perdana Menteri Erbakan”**.

Skripsi ini dapat terselesaikan berkat adanya bantuan dan kerjasama dari beberapa pihak yang sangat membantu penulis. Karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas motivasi, saran, ilmu, bimbingan, petunjuk, fasilitas, dan lain-lain kepada:

1. Drs. Achmad Habibullah Msi, Selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan masukan yang berarti bagi penulis.
2. Drs. H. Nuruddin M. Yasin, selaku Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Jember.
3. Drs. Himawan Bayu Patriadi MA, selaku Dosen Wali.
4. Drs. H. Moch. Toerki, selaku Dekan FISIP Universitas Jember.
5. Seluruh Dosen dan Staff Administrasi serta segenap Civitas Akademika FISIP Universitas Jember.
6. Keluarga: Mami, Papi atas segala dukungannya baik moril maupun spiritual, Mas Iwit *be good brother for your sisters guy!*, Een and my little sister Tipoenk.
7. Sahabat-sahabatku: Imas, Agung, Awang, Doni *thank's for accompany me until the end*, juga Uki, Astrid, Faizol, Inal yang sudah lulus duluan, terima kasih buat kebersamaan kita selama ini.
8. Keluarga Belitung I/35: Mba' Dian, Titah, Lila, Wisnu, Ipoenk, Fifi, Nunik, Ari, dan Yoland.

9. Sahabat-sahabat kisah klasikk: Indra, Dani, Dian, Lia, Lena *and thank's a lot for Yara buat tumpangan dan temen nongkrong di Jogja, juga temen-temen di Jogja, keep Yogya Smile dab!*
10. Sahabat pertamaku di Jember Vivi *thank's for your support and everythink* juga Reza dan keluarga di Surabaya.
11. Teman-teman KKN Desa Wirowongso, Pak Kordes Lukman dan anak buahnya, Mas Edi dan keluarga terimakasih tumpangannya, juga Fajar *thank's for being my best friend in KKN.*
12. Teman-temanku, Mr. Ogah *thank's for your idea and your help in the first time I do this skription*, Erwin dan Bogres *thank's for being my friends and your helps* disaat-saat terakhir, juga Yan dan Fiet.
13. *Thank's to U2, for the amazing Songs 'n for the Inspiration "Stuck in the Moment and U Can't Get Out" and "I Still Haven't Found What I'm Looking For".*
14. Teman-teman HI'98, Ika, Evin, Lailin, Ratna serta rekan-rekan dan semua pihak yang telah membantu penulis, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahannya, *tidak ada gading yang tak retak*, untuk itu kritik dan saran sangat penulis perlukan. Semoga karya tulis ini bermanfaat bagi yang membacanya, serta mampu memberikan sedikit tambahan ilmu yang berguna.

Jember, Juni 2003

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

1.1 Alasan Pemilihan Judul .....	1
1.2 Ruang Lingkup Pembahasan .....	7
1.3 Permasalahan .....	8
1.4 Kerangka Dasar Teori.....	10
1.5 Hipotesis .....	16
1.6 Metodologi.....	16
1.6.1 Metode Pengumpulan Data .....	16
1.6.2 Metode Analisis Data .....	17
1.7 Pendekatan.....	18

### **BAB II TINJAUAN KEBIJAKAN POLITIK LUAR NEGERI TURKI SECARA UMUM**

2.1 Gambaran Umum Politik Luar Negeri Turki .....	19
2.1.1 Pada Masa Perang Dingin.....	19
2.1.2 Pasca Perang Dingin.....	21

2.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Politik	
Luar Negeri Turki.....	30
2.2.1 Faktor Fisik.....	30
2.2.2 Faktor Non Fisik.....	34

### **BAB III POLITIK LUAR NEGERI TURKI TERHADAP AMERIKA SERIKAT**

3.1 Politik Luar Negeri Turki terhadap Amerika	
Serikat Sebelum Pemerintahan Erbakan.....	51
3.1.1 Pada Masa Perang Dingin.....	51
3.1.2 Pasca Perang Dingin.....	53
3.1.3 Pengaruh Perang Teluk dalam Hubungan Turki-Amerika Serikat.....	55
3.1.4 Masalah Pelanggaran HAM terhadap Suku Kurdi .....	59
3.2 Orientasi Politik Luar Negeri Turki	
pada masa Pemerintahan Erbakan.....	62
3.2.1 Latar belakang dan Obsesi Erbakan .....	62
3.2.1 Orientasi Politik Luar Negeri Erbakan “Islamic Oriented” (Meningkatkan Hubungan Turki dengan Negara-negara Islam).....	64
3.2.2.1 Menjalin hubungan bilateral dengan Iran.....	65
3.2.2.2 Menjalin hubungan bilateral dengan Libya .....	66
3.2.2.3 Menjalin hubungan bilateral dengan Irak.....	67
3.2.2 Orientasi Politik Luar Negeri Erbakan anti Amerika Serikat .....	68
3.2.3.1 Erbakan menjauhi Uni Eropa.....	69
3.2.3.2 Erbakan menjauhi NATO .....	70
3.2.3.3 Erbakan menjauhi Israel.....	71

**BAB IV FAKTOR-FAKTOR PENGARUH DAN DAMPAK DARI  
PERUBAHAN ORIENTASI POLITIK LUAR NEGERI TURKI  
TERHADAP AMERIKA SERIKAT**

4.1	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perubahan Orientasi Politik Luar Negeri Turki terhadap Amerika Serikat .....	73
4.1.1	Kemenangan Partai Refah Dalam Pemilu 1995.....	73
4.1.2	Gagalnya Koalisi Partai Sekuler (Yilmaz-Ciller) .....	81
4.1.3	Naiknya Erbakan Sebagai Perdana Menteri Turki.....	87
4.1.4	Kebijakan Islamisasi Erbakan .....	94
4.2	Dampak dari Perubahan Orientasi Politik Luar Turki .....	95
4.2.1	Sikap Amerika Serikat terhadap Pemerintahan Erbakan .....	95
4.2.2	Tekanan Militer terhadap Pemerintahan Erbakan .....	98
4.2.3	Kondisi Dalam Negeri Turki.....	102

**BAB V KESIMPULAN..... 105**

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### 1.1 Alasan Pemilihan Judul

Sepanjang Perang Dingin, kebijakan luar negeri Turki merupakan kebijakan yang bersifat pasif, yaitu kebijakan luar negeri yang menganut paham *Peace at Home, Peace Abroad*.<sup>1</sup> Inti dari kebijakan ini adalah bahwasannya Turki lebih memfokuskan diri pada pembangunan didalam negeri dan tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain. Kebijakan ini sendiri merupakan kebijakan yang dikenal oleh para diplomat Turki sebagai salah satu warisan Kemal Attaturk, bapak pendiri Republik Turki Modern.<sup>2</sup>

Fokus perhatian politik luar negeri Turki selama Perang Dingin berlangsung adalah terhadap usaha-usaha untuk menjalin kerjasama dengan negara-negara dikawasan sekitar Turki yang umumnya merupakan kawasan yang sangat tidak stabil dan membahayakan keamanan dalam negeri Turki. Terdapat tujuh kawasan yang menjadi fokus perhatian bagi pelaksanaan kebijakan luar negeri Turki yaitu : kawasan Eropa Barat, kawasan Balkan, kepulauan Aegean dan Mediterania Utara, kawasan Kaukasus-Kaspia, kawasan Asia Tengah, dan

<sup>1</sup> Alan Makovsky, *The New Activism in Turkish Foreign Policy*, dalam SAIS Review, Winter-Spring 1999, hal. 10 ([www.washingtoninstitute.org/media/amakovsky/alansais.htm](http://www.washingtoninstitute.org/media/amakovsky/alansais.htm), diakses 12 September 2002).

<sup>2</sup> Republik Turki pada dasarnya didirikan di atas 6 prinsip. Pertama, *Republikanisme*; bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat. Prinsip ini merubah dasar-dasar ideologi dan sistem lama, dimana Tuhanlah yang memiliki kedaulatan dan otoritas yang nyata ( kedaulatan Tuhan ) bukan keinginan rakyat, telah dihilangkan. *Nasionalisme Turki*; menekankan kejayaan Turki di masa lalu dan kebutuhan bagi Turki untuk negara mereka sendiri dengan prinsip-prinsip modern tanpa campur tangan negara lain. *Populisme*; suatu ide bahwa penduduk diperintah melalui Majelis Agung Nasional dengan semua kepentingan sosial dan ekonomi terwakili, dan menekankan pentingnya penduduk sebagai oposisi kelompok elit. *Statisme*; adanya campur tangan negara dalam bidang ekonomi dan kontrol terhadap bidang lainnya untuk menjamin laju pertumbuhan ekonomi. *Revolusionisme*; mendukung keinginan untuk menerima transformasi secara tetap dan semua perubahan akan diinstitutionalkan secara penuh sehingga masyarakat Turki dapat berkembang secepat mungkin. Terakhir, *Sekulerisme*; memisahkan secara penuh antara agama dan negara. Keenam prinsip ini diadopsi oleh kongres Partai Republik Rakyat yang dipimpin Ataturk pada tahun 1937. Kemudian dituangkan dalam konstitusi Republik dan dikenal sebagai *The Six Arrows*, dalam Roderic H. Davison, *Turkey, the Modern Nations in Historical Perspective*, Prenticehall Inc., Englewood, New Jersey, 1968, hal. 139.

Laut Hitam.<sup>3</sup> Pada masa itu kawasan Kaukasus dan Asia Tengah berada dibawah kontrol Uni Sovyet, kawasan Balkan berada dalam kontrol Presiden Tito dari Yugoslavia, sedangkan kawasan Timur Tengah merupakan wilayah yang tidak stabil karena konflik antara negara-negara di kawasan tersebut.

Kerjasama dengan negara-negara di kawasan sekitar Turki dilakukan untuk menutupi kelemahan Turki dibidang pertahanan dan keamanan, dan untuk meningkatkan kerjasama dibidang ekonomi. Namun kerjasama dengan negara-negara tersebut seringkali digunakan oleh Turki untuk mendapatkan dukungan terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapinya. Salah satunya adalah mengenai dukungan Turki terhadap Palestina, yang ditujukan guna mendapatkan dukungan dari negara-negara Arab terhadap permasalahan Turki dengan Cyprus.

Salah satu negara yang menjadi fokus hubungan luar negeri Turki adalah Amerika Serikat. Sepanjang Perang Dingin, Turki merupakan negara yang menjadi sekutu strategis bagi Amerika Serikat untuk menangkal pengaruh Uni Sovyet dikawasan Timur Tengah. Selama beberapa dekade tersebut kedua negara membangun hubungan strategis yang intim dikawasan Timur Tengah, dimana Turki menyediakan fasilitas militernya untuk digunakan pasukan Amerika Serikat, sementara itu Amerika Serikat memberikan bantuan kepada Turki dibidang ekonomi dan militer.<sup>4</sup> Dengan melakukan hubungan luar negeri yang strategis dengan Amerika Serikat dan negara-negara Barat lainnya maka Turki banyak mendapatkan keuntungan dalam usahanya untuk mempercepat proses pembangunan yang telah dicanangkan oleh Attaturk.

Pasca Perang Dingin Turki mengalami kekhawatiran akan kehilangan keuntungan dari Amerika Serikat dan negara-negara Barat. Asumsi yang mendasari ketakutan ini adalah setelah Perang Dingin resmi berakhir, yang ditandai dengan hancurnya Tembok Berlin pada 9 November 1989 dan diikuti dengan bersatunya Jerman Barat dan Jerman Timur pada 3 Oktober 1990,

---

<sup>3</sup> Alan Makovsky and Sabri Sayari, eds., *Turkey's New World Changing Dynamic In Turkey Foreign Policy*, hal. 1 ( [www.washingtoninstitute.org/pubs/intro/turkintro.htm](http://www.washingtoninstitute.org/pubs/intro/turkintro.htm), diakses pada 12 September 2002).

<sup>4</sup> *Ibid.*, hal. 2

kemudian runtuhnya Uni Sovyet pada tanggal 25 Desember,<sup>5</sup> bersamaan dengan mundurnya Mikhail Gorbachev sebagai Kepala Negara, mengakibatkan Amerika Serikat menjadi satu-satunya kekuatan dunia.

Kekhawatiran Turki berubah ketika Irak melakukan invansi militer terhadap Kuwait di tahun 1990.<sup>6</sup> Pada saat itu kondisi geostrategis Turki menjadi sangat penting seiring dengan peran serta militer Turki dalam Perang Teluk dan masa sesudahnya ketika Amerika Serikat berusaha menggulingkan rezim Saddam Hussein. Hal itu membuat Turki kembali menjadi prioritas utama bagi pelaksanaan kebijakan luar negeri Amerika Serikat.

Terdapat beberapa faktor yang mendasari alasan Amerika Serikat untuk tetap menjalin kerjasama yang strategis dengan Turki:<sup>7</sup> pertama, Turki merupakan negara yang moderat dan pro terhadap Barat di kawasan yang tidak stabil. Kedua, Turki merupakan negara demokrasi dengan mayoritas rakyatnya beragama Islam sehingga Turki mendukung proses normalisasi Islam-Israel dan proses perdamaian Israel-Palestina. Ketiga, Turki merupakan markas *Operation Provide Comfort* (OPC), yang bertugas mengawasi pelaksanaan area bebas terbang di Irak bagian Utara dan melindungi suku Kurdi dari ancaman tentara Saddam Hussein. Keempat, Turki merupakan musuh ideologis bagi Iran. Kelima, Turki merupakan negara pelindung bagi pengaruh Rusia di kawasan Timur Tengah dan merupakan negara yang disegani namun anti-perang dan anti-separatisme dalam memandang berbagai konflik yang melibatkan kaum muslim dikawasannya (Azerbaijan, Bosnia, Kosovo dan Chechnya), yang kesemuanya memiliki tali persaudaraan dengan rakyat Turki yang beragam. Kecenam, Turki merupakan lokasi penjualan bagi negara-negara penghasil energi di kawasan laut Kaspia selain Rusia dan Iran.

<sup>5</sup> Juwono Sudarsono, *State of the Art Hubungan Internasional : Mengkaji Ulang Teori Hubungan Internasional*, dalam Zainuddin Djafar, Perkembangan Studi Hubungan Internasional dan Tantangan masa Depan, Dunia pustaka Jaya, Jakarta, 1996, hal. 3.

<sup>6</sup> Konflik Irak-Kuwait yang berkembang menjadi perang Irak-AS dan para sekutunya berasal dari pelanggaran kuota OPEC yang dilakukan rezim-rezim Kuwait, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab yang kemudian diikuti dengan serbuan pasukan Baghdad ke Kuwait pada 2 Agustus 1990 dan serbuan pasukan "multinasional" ke Irak 17 Januari 1991, M. Riza Sihbudi, *Dari Konflik Irak – Kuwait ke Konflik Irak- AS*, dalam Global, Jurnal Politik Internasional, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991, hal. 24.

<sup>7</sup> Alan Makovsky, *The New Activism.....,op.cit*, hal. 10.

Namun kerjasama yang saling menguntungkan antara Turki dengan Amerika Serikat tersebut mengalami stagnasi pada tahun 1995. Salah satu faktor yang memicu perubahan kebijakan luar negeri Turki terhadap Amerika Serikat adalah perubahan kondisi domestik Turki.

Kondisi politik dan pemerintahan Turki mengalami ketidakstabilan semenjak pemilu terakhir yang dilakukan pada bulan Desember 1995, dimana pemilu tersebut menghasilkan kemenangan bagi Partai Islam Refah. Apalagi perebutan kursi di Parlemen juga mengalami kegagalan dalam menghasilkan pemerintahan koalisi yang kuat, stabil dan bersifat sekuler. Kemudian Partai Islam Refah pimpinan Necmettin Erbakan yang memperoleh 158 kursi berkoalisi dengan Partai Jalan Kebenaran (DYP) pimpinan Tansu Ciller yang memperoleh 129 kursi. Koalisi kedua partai tersebut menguasai 287 kursi, sedangkan kursi mayoritas yang ditentukan dalam parlemen berjumlah 276.<sup>8</sup> Semenjak itu, Turki dikendalikan oleh 2 pemerintahan minoritas yang dipimpin oleh kelompok Islam sehingga mendorong kubu sekuler dan kaum militer menjadi oposisi aktif bagi pemerintah.

Pemerintahan koalisi ini terbentuk berdasarkan kesepakatan antara kedua pemimpin partai. Susunan kabinet dibagi sesuai dengan kesepakatan: Partai Refah menduduki 19 pos termasuk kursi Perdana Menteri, 8 kementerian yang memiliki departemen dan 9 kementerian tanpa departemen. Sedangkan Partai Jalan Kebenaran menguasai 18 pos, 9 kementerian memiliki departemen dan yang 9 tanpa departemen.<sup>9</sup> Sementara itu Tansu Ciller sebagai pemimpin Partai Jalan Kebenaran menduduki jabatan sebagai wakil Perdana Menteri dan Menteri Luar negeri. Selain dari kekuasaan perdana menteri, Refah tidak memiliki departemen yang menangani pembuatan kebijakan luar negeri dan keamanan, tetapi Refah menguasai departemen keuangan dan ekonomi.

Pembentukan pemerintahan koalisi ini ternyata memunculkan banyak permasalahan, terutama mengenai pembuatan kebijakan luar negeri. Permasalahan

---

<sup>8</sup> Alan Makovsky, "Islamist Take Power in Turkish Coalition", dalam *Policywatch*, 28 June 1996, hal. 1 ([www.washingtoninstitute.org/watch/policywatch/policywatch1996/206.htm](http://www.washingtoninstitute.org/watch/policywatch/policywatch1996/206.htm), diakses pada 12 September 2002).

<sup>9</sup> *Ibid.*, hal. 2.

ini bersumber pada peran Erbakan sebagai Perdana Menteri yang seringkali melangkahi garis wewenang dalam proses pembuatan kebijakan luar negerinya, terutama mengenai hubungan Turki dengan Amerika Serikat. Fenomena tersebut dipicu oleh beberapa faktor:<sup>10</sup> Pertama, peran Erbakan yang kuat dalam pemerintahan akan menyulitkan pemerintah Amerika Serikat dan para pendukung Turki sekuler untuk menyakinkan sikap skeptik Kongres Amerika Serikat dan negara-negara lainnya (terutama negara-negara anggota Uni Eropa), bahwasannya Turki tetap merupakan negara yang sekuler, demokratis dan pro terhadap Barat. Kedua, pandangan konspirator Erbakan dan kegemarannya bertindak ofensif akan menghilangkan sebagian besar negara yang selama ini menjadikan Turki sebagai sahabatnya. Hal ini nampak pada pernyataannya diawal tahun bahwasannya Israel adalah "a timeless enemy", dan menyatakan bahwa dua garis di dalam bendera Israel melambangkan rencana kaum Zionis untuk menguasai seluruh tanah mulai Sungai Nil hingga Sungai Euphrat. Ketiga, Erbakan secara terbuka memberikan dukungan dan melakukan kerjasama dengan kelompok Islam Radikal di Iran, Persaudaraan Muslim di Mesir dan kelompok Hamas Palestina telah meningkatkan secara potensial permasalahan di bidang keamanan. Hal ini disebabkan sebagai Perdana Menteri dan anggota Lembaga Pertahanan Nasional (NSC) memiliki kekuasaan yang kuat, Erbakan mempunyai akses pribadi kedalam NATO, rencana kerjasama bilateral untuk menumpas Terorisme, dan berbagai informasi kerjasama keamanan lainnya. Keempat, Erbakan adalah seorang yang idealis dan memiliki keinginan untuk membawa Turki kearah yang berlainan dengan kepentingan Amerika Serikat.

Pertentangan di dalam negeri mengenai kelanjutan hubungan Turki dengan Amerika Serikat setelah naiknya partai Refah ke puncak kekuasaan mengakibatkan semakin meluasnya konflik antar partai dan kelompok kepentingan lainnya serta semakin memicu menurunnya hubungan Turki dengan Amerika Serikat. Perbedaan ideologi dalam tubuh koalisi semakin nampak karena

---

<sup>10</sup> Alan Makovsky, "U.S. Relations With Erbakan's Turkey, dalam *Policywatch*, 8 Agustus 1996, hal. 1 ([www.washingtoninstitute.org/watch/policywatch/policywatch1996/213.htm](http://www.washingtoninstitute.org/watch/policywatch/policywatch1996/213.htm), diakses pada

sebagai Perdana Menteri peran Erbakan sangat penting dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri Turki sedangkan kebijakan-kebijakan luar negeri yang diambil Erbakan dianggap bertentangan dengan prinsip “negara sekuler”.<sup>11</sup>

Sikap Erbakan dan partainya yang anti terhadap Amerika Serikat mengejutkan Menlu Tansu Ciller yang seorang sekularis, nasionalis sejati dan pro terhadap militer. Apalagi Militer yang menganggap dirinya sebagai pengawal prinsip-prinsip “negara sekuler” dan banyak mendapatkan bantuan militer dari Amerika Serikat semakin meningkatkan kecemasan terhadap kebijakan Islamisasi Erbakan.

Hubungan Turki dengan Amerika Serikat mengalami penurunan, hal ini dikarenakan kebijakan luar negeri Erbakan dimulai dengan merangkul negara-negara tetangga Turki yang pernah berseteru pada saat Turki dikuasai oleh rezim sekuler dan merupakan musuh dari Amerika Serikat. Kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Erbakan yang dilakukan secara bertahap ke negara-negara Islam, seperti: Iran, Irak, Libya, Pakistan, dan Indonesia membuat Amerika Serikat cemas. Turki dianggap tidak menuruti instruksi jalur politik Gedung Putih.<sup>12</sup>

Kunjungan Perdana Menteri Erbakan ke Iran untuk menandatangani kesepakatan pembelian minyak dan gas bernilai 23 Miliar Dollar mendapat kecemasan dari Amerika Serikat, yang mengisolasi Iran karena dianggap sebagai terorisme internasional.<sup>13</sup> Erbakan juga menugaskan Menlu Tansu Ciller untuk berkunjung ke Irak, sebuah negara yang sangat dibenci Amerika Serikat. Kedua negara bahkan sepakat untuk meningkatkan kembali kerjasama dibidang ekonomi dan membuka kembali jaringan pipa yang terbentang dari ladang-ladang minyak Irak ke pelabuhan Turki yang sempat terhenti karena adanya embargo ekonomi terhadap Irak akibat invasinya ke Kuwait.

---

<sup>11</sup> Prinsip dasar negara sekuler adalah pemisahan antara agama dan negara. Agama diakui tetapi harus dipisahkan dari negara agar tidak dimanipulasi untuk kepentingan politik. Demikian dan sebaliknya untuk menghindari terjadinya manipulasi politik untuk kepentingan agama. Negara sekuler lebih menekankan pada pembangunan dunia, tetapi tidak mengabaikan agama. Dalam Kompas, 29 April 1997.

<sup>12</sup> Setia Budi HP, *Babak Baru Politik Turki*, Suara Merdeka, 27 Agustus 1996.

<sup>13</sup> *loc. cit.*

Bill Clinton juga kebingungan dengan manufer-manufer politik Turki yang sedikit banyak menggoyahkan posisinya sebagai Presiden Amerika Serikat. Turki yang diharapkan dapat dijadikan sebagai penyangga kepentingan dan pengaruh Amerika Serikat di Timur Tengah menunjukkan tanda-tanda antiklimaks dan lebih cenderung pro-Islam.

Dari fenomena yang telah dipaparkan diatas maka penulis berusaha mengkajinya kedalam suatu karya tulis dengan mengangkat judul:

**“Perubahan Orientasi Politik Luar Negeri Turki Terhadap Amerika Serikat (Pada Masa Pemerintahan PM. Necmettin Erbakan)”**

## **1.2 Ruang lingkup Pembahasan**

Agar dalam pembahasan selanjutnya lebih terarah dan jelas maka diperlukan suatu batasan permasalahan ruang lingkup pembahasan. Tujuan diadakannya pembatasan tersebut dengan menentukan ruang lingkupnya adalah untuk mempermudah dalam menganalisa permasalahan (*Problem Analysis*) secara sistematis dan terarah, untuk mencapai suatu pembahasan yang menyeluruh (*comprehensive*).

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan karya ilmiah ini maka penulis membatasinya dalam dua batasan yaitu: batasan materi dan batasan waktu.

Batasan materi mengacu pada cakupan kawasan gejala atau daerah studi. Yang menjadi pokok bahasan dalam tulisan ini, adalah mengenai perubahan politik dalam negeri Turki dan implikasinya terhadap pembuatan kebijakan luar negerinya terhadap Amerika Serikat setelah naiknya Erbakan sebagai Perdana Menteri Turki.

Batasan Waktu, adalah rentangan waktu terjadinya peristiwa objek analisis. Dalam penulisan ini, penulis memberikan batasan waktu tersebut antara tahun 1995 sampai dengan tahun 1997, berdasarkan pada peristiwa-peristiwa politik yang terjadi dalam rentang waktu tersebut.

Tahun 1995 merupakan awal terjadinya perubahan politik di Turki dengan kemenangan Partai Refah dalam pemilu, Refah mendapatkan 158 kursi dari 550

kursi atau sekitar 21,4% suara di parlemen, disusul oleh Partai Jalan Kebenaran (DYP) 135 kursi kemudian diikuti Partai Tanah Air (ANAP) 132 kursi.<sup>14</sup>

Kemenangan Partai Islam Refah menghantarkan Erbakan sebagai PM. Turki. Dengan tampilnya Erbakan maka berakhirilah dominasi rezim sekuler yang memerintah Turki selama 73 tahun. Turki mengalami perubahan politik baik politik dalam negeri maupun luar negeri. Erbakan melakukan berbagai pembaharuan yang bertolak belakang dengan kubu sekuler. Sehingga terjadi perseteruan dalam tubuh koalisi. Apalagi militer turut campur terhadap setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Erbakan juga mendapat tekanan dari luar negeri, terutama Amerika Serikat. Akibat tekanan-tekanan dari berbagai pihak maka Erbakan mengundurkan diri dari kursi Perdana Menteri pada tanggal 18 Juni 1997.

### 1.3 Permasalahan

Permasalahan merupakan titik awal dari sebuah peristiwa yang mengantar seorang peneliti menuju pada upaya pemecahan dalam sebuah pembahasan ilmiah. Untuk itu maka penulis akan memberikan uraian tentang latar belakang masalah yang kemudian merumuskannya dalam permasalahan.

Seperti yang diuraikan di atas, bahwa setelah Partai Refah mendapatkan legitimasi untuk membentuk pemerintahan baru bersama dengan mitra koalisinya, Partai Jalan Kebenaran, Necmettin Erbakan sebagai pemimpin Partai Refah mendapat kesempatan sebagai Perdana Menteri pada putaran pertama sedangkan Ciller sebagai pemimpin Partai Jalan Kebenaran akan mendapatkan jatah sebagai Perdana Menteri pada putaran kedua setelah dua tahun.

Pada saat Necmettin Erbakan tampil sebagai Perdana Menteri banyak terjadi perubahan kebijakan, baik dalam negeri maupun luar negeri. Perubahan yang terjadi didalam negeri adalah suburnya fundamentalisme Islam seperti; adanya kebijakan pemurnian syariah, pencabutan larangan berjilbab karena dianggap larangan tersebut melanggar HAM, menggalakkan pembangunan masjid-masjid dan merenovasi masjid-masjid lama yang selama pemerintahan

<sup>14</sup> Alan Makovsky, *Islamist Take Power...*, *op.cit.* hal. 1.

rezim sekuler kurang terurus dan merencanakan pembangunan masjid di lapangan Takzim, yang merupakan lapangan di tengah kota Istanbul dan simbol sekulerisme Turki.<sup>15</sup>

Kebijakan tersebut mendapat hambatan dari kubu oposisi yang didukung oleh militer, karena dianggap sebagai ancaman bagi prinsip negara sekuler. Namun Refah justru semakin populer dimata rakyat, karena kekecewaan rakyat terhadap pemerintahan sekuler yang cenderung korupsi dan kurang memperhatikan kaum bawah (miskin) membuat mereka berpaling ke partai Islam yang cenderung lebih bisa dipercaya dan bersih dari korupsi dan manipulasi dibandingkan dengan pejabat dari partai sekuler. Apalagi gerakan Partai Refah lebih banyak membantu permasalahan kaum miskin, seperti masalah kesehatan, pendidikan dan perjuangan kaum buruh.

Perdana Menteri Erbakan secara bertahap juga merubah orientasi kebijakan luar negeri Turki dari yang pro-Barat menjadi lebih bersifat pro-Timur (Islam). Erbakan mengesampingkan hubungan Turki dengan Uni Eropa, karena dari perjalanan usaha rezim sekuler untuk mendapatkan status keanggotaan penuh di lembaga tersebut mengalami kegagalan. Refah secara ekstrem mendukung kebijakan untuk bekerja sama dengan negara-negara Islam seperti Iran, Irak, Libya, Syria dan Saudi Arabia, bahkan Erbakan secara aktif menjalin hubungan dengan Iran.

Kerjasama antara Turki dengan Iran dilakukan Erbakan untuk membalas tindakan pemerintah konservatif yang menandatangani perjanjian militer dengan Israel pada Januari 1996, dimana Israel diperbolehkan menerbangkan pesawat mata-mata di sepanjang perbatasan Suriah, Irak dan Iran musuh-musuh Barat. Erbakan menandatangani kerjasama ekonomi dengan Iran yang berupa kesepakatan pembangunan jaringan pipa gas senilai 23 Milliar Dollar AS, dimana Iran akan memasok gas ke Turki selama 20 tahun, dilakukan Erbakan dua minggu setelah Amerika Serikat meratifikasi Undang-Undang Anti-Iran dan Lybia, yang akan menghukum perusahaan non-Amerika yang menanamkan modalnya di

---

<sup>15</sup> Republika, 1 Februari 1997.

kedua negara ini lebih dari 40 Juta Dollar AS dalam setahun. Hal yang sama juga dilakukan Erbakan dengan Libya sebulan kemudian.<sup>16</sup>

Perubahan orientasi politik luar negeri Turki tersebut mengakibatkan Amerika Serikat kebingungan bagaimana cara untuk menjalin hubungan dengan salah satu negara sekutunya dimana pemimpinnya memiliki kebijakan jangka panjang yang berlawanan dengan kepentingan pribadi Amerika Serikat di negara tersebut.<sup>17</sup>

Berdasarkan kenyataan diatas penulis mengambil permasalahan:

**“Faktor-faktor apa yang mempengaruhi perubahan orientasi politik luar negeri Turki terhadap Amerika Serikat pada masa pemerintahan Perdana Menteri Necmettin Erbakan ?”**

#### 1.4 Kerangka Dasar Teori.

Teori adalah suatu penjelasan umum mengenai fenomena tertentu yang diungkapkan secara memuaskan kepada seseorang yang mengenal karakteristik realitas-realitas yang sedang dipelajari.

Menurut Mohtar Mas'ood teori ketika menjelaskan suatu fenomena memerlukan pembuktian secara sistematis sehingga teori yang baik adalah teori yang bisa didukung atau ditolak melalui analisa yang jelas dan penggunaan data yang sistematis serta memuat konsep-konsep yang jelas.<sup>18</sup> Jadi teori merupakan suatu alat eksplanasi terhadap suatu permasalahan dan juga merupakan suatu konsepsi abstrak yang berfungsi sebagai pisau analisa terhadap permasalahan yang sedang dihadapi.

Untuk menganalisa permasalahan dalam tulisan ini, maka penulis mendasarkan analisa pada **Teori Determinan Politik Luar Negeri**. Menurut William D. Coplin determinan politik luar negeri diartikan sebagai seperangkat faktor yang membentuk atau menyebabkan diambilnya strategi atau rencana tindakan oleh para pengambil keputusan dalam suatu negara dalam menghadapi

<sup>16</sup> Smith Alhadar, *Krisis Politik Turki*, Kompas, 11 Juli 1997.

<sup>17</sup> Alan Makovsky, *US Relation...*, op.cit, hal. 1.

<sup>18</sup> Mohtar Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi*, LP3ES, Jakarta, 1994, hal. 187.

negara lain atau unit politik internasional lainnya.<sup>19</sup> Dalam teori tersebut, lebih lanjut Coplin menjelaskan bahwa terdapat empat faktor yang menjadi “penyebab” perilaku politik luar negeri, yaitu:<sup>20</sup>

1. Konteks internasional
2. Perilaku para pengambil keputusan politik luar negeri
3. Dampak kondisi ekonomi dan militer terhadap negara
4. Peran politik dalam negeri dalam perumusan politik luar negeri.

Untuk menganalisa tulisan ini maka penulis menggunakan tiga variable dari determinan politik luar negeri, yaitu:

*Perilaku para pengambil keputusan* merupakan faktor yang penting dalam penentuan perilaku politik luar negeri. Dalam proses politik, keputusan merupakan unsur penting yang berperan sebagai output. Pembuatan keputusan merupakan politik dalam makna yang paling dasar sehingga menyebabkan dominannya peran para pengambil keputusan.

Pengambilan keputusan luar negeri Turki dibentuk oleh Presiden, Perdana Menteri, Militer dan Departemen Luar Negeri.<sup>21</sup> Presiden turut serta dalam proses pengambilan keputusan luar negeri Turki baru dilakukan pada masa kepresidenan Turgut Ozal (1989-1993), di mana sebelumnya lembaga kepresidenan Turki hanya bersifat ceremonial belaka.

Sedangkan Perdana Menteri merupakan aktor politik yang paling penting dalam menentukan kebijakan luar negeri yang hendak diambil dimana keikutsertaannya dalam merumuskan kebijakan luar negeri Turki dipengaruhi oleh kepentingan pribadi. Dalam hal ini, Richard C. Snyder mendefinisikan pengambilan keputusan sebagai tindakan yang dilakukan oleh segelintir orang yang bertindak atas nama negara ( para pembuat keputusan resmi).<sup>22</sup> Semua

<sup>19</sup> William D. Coplin, *Introduction to International Politics: a theoretical overview*, diterjemahkan oleh Marsedes Marbun, *Politik Internasional: Suatu Telaah Teoritis*, edisi kedua, CV. Sinar Baru, Bandung, 1992, hal. 165.

<sup>20</sup> *Loc. Cit.*

<sup>21</sup> Alan Makovsky, *The New Activism ...*, *op.cit.*, hal. 4.

<sup>22</sup> Richard C. Snyder, dikutip dalam Eby Hara, *Decision Making Theories dalam Studi Hubungan Internasional*, *Jurnal Ilmu Politik Volume 9*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991.

keputusan dalam politik luar negeri merupakan keputusan sebagaimana yang dipersepsikan oleh para pembuat keputusan ini.

Sehingga pada saat menjabat sebagai perdana menteri, Erbakan berusaha mewujudkan obsesinya membawa Turki untuk berpaling ke Timur, namun Erbakan juga banyak mendapat tekanan dari pihak militer terutama mengenai kerjasama keamanan antara Turki dengan Israel. Apalagi militer Turki juga merupakan aktor yang dominan dalam politik luar negeri Turki, pengaruh mereka nampak dalam Lembaga Keamanan Nasional (NSC), dimana sebagian besar anggotanya adalah elit militer.

Sedangkan Departemen Luar Negeri bertugas sebagai pelaksana sehari-hari kebijakan luar negeri yang telah ditetapkan dan berfungsi sebagai sumber utama dalam menangani berbagai isu yang melingkupi pelaksanaan kebijakan luar negeri Turki.

Faktor ketiga dalam determinan politik luar negeri adalah *kondisi ekonomi dan militer*. Pentingnya faktor tersebut didasarkan pada asumsi bahwa kemampuan ekonomi dan militer akan memberikan keuntungan mutlak bagi beberapa negara dalam berurusan dengan negara lain. Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan perilaku politik luar negeri akan terlihat jelas ketika negara-negara yang tingkat perekonomiannya rendah berada dalam posisi yang lemah apabila terlibat permusuhan. Negara-negara tersebut akan didominasi oleh negara yang tingkat ekonominya sudah lebih maju. Hal yang sama juga akan terjadi pada negara yang lemah dalam bidang militer, yang cenderung akan didominasi oleh negara yang kemampuan militernya lebih kuat.

Kondisi ekonomi Turki mengalami penurunan seiring dengan krisis politik dalam negeri, apalagi ketergantungan Turki terhadap Barat dan keinginannya untuk menjadi anggota penuh Uni Eropa tidak mendatangkan hasil. Sedangkan dalam bidang militer, dimana militer Turki banyak mendapatkan bantuan persenjataan dari Amerika Serikat namun berakhirnya Perang Dingin telah merubah strategi militer Amerika Serikat secara global dengan melakukan pengurangan bantuan militer terhadap negara-negara sekutunya, termasuk Turki. Ditambah dengan meningkatnya eskalasi pelanggaran HAM di Turki, yang

mendorong kongres dan publik Amerika Serikat untuk meninjau kembali kebijakan luar negerinya terhadap Turki.

Faktor terakhir dalam determinan politik luar negeri adalah *peran politik dalam negeri dalam perumusan politik luar negeri*. Pada hakekatnya kebijakan luar negeri merupakan kepanjangan tangan dari politik dalam negeri atau dengan kata lain kebijakan luar negeri merupakan kehendak nasional dalam lingkup hubungan internasional. Stabilitas dan perubahan politik dalam negeri mempengaruhi perubahan kebijakan politik luar negeri suatu negara.

Kondisi politik dalam negeri Turki mengalami ketidakstabilan semenjak jatuhnya pemerintahan koalisi pimpinan Perdana Menteri Tansu Ciller pada tahun 1994, kemudian dipercepatnya pemilu pada bulan Desember 1995 yang menghantarkan Partai Refah sebagai satu-satunya Partai Islam di Turki pada puncak kemenangan. Kemenangan tersebut telah membawa Erbakan pemimpin Partai Refah sebagai Perdana Menteri Turki.

Perubahan menurut Robert A. Nisbet merupakan penggantian yang berkaitan dengan perbedaan waktu dan identitas yang mapan.<sup>23</sup> Perubahan politik menurut Jack C. Plano diartikan sebagai transformasi struktur, proses atau tujuan-tujuan yang mempengaruhi distribusi dan penggunaan kekuasaan yang memerintah dalam masyarakat.<sup>24</sup> Sedangkan politik luar negeri menurut Sufri Yusuf adalah merupakan iringan kebijaksanaan disertai rentetan tindakan yang rumit tetapi dinamis yang ditempuh oleh negara itu dalam hubungannya dengan negara-negara lain atau sebagai kegiatannya dalam organisasi-organisasi regional dan internasional.<sup>25</sup> Dengan kata lain perubahan politik luar negeri dalam hal ini tidak semata-mata sebagai sebuah perubahan kebijakan yang terencana ataupun tertulis tetapi juga dipraktikkan dalam suatu waktu. Tindakan-tindakan yang mengikuti perubahan kebijakan luar negeri tersebut dilakukan pula oleh para pembuat kebijakan yang berkuasa pada waktu itu dan pelaksanaannya sesuai

<sup>23</sup> Robert A. Nisbet, *The Social Bond on Introduction to The Study of Society*, Koff, New York, 1979, hal. 302

<sup>24</sup> Jack C. Plano, Roberts Eriggs, Helenan S. Robin, *The Dictionary of Political Analysis*, diterjemahkan oleh Edi S. Siregar, *Kamus Analisa Politik*, CV. Rajawali, Jakarta, 1985, hal. 162.

<sup>25</sup> Sufri Yusuf, SH, *Hubungan Internasional dan Politik Luar Negeri: Sebuah Analisis Teoritis dan uraian tentang Pelaksanaannya*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1989, hal. 113.

dengan kepentingan negara dan pemerintah yang menjalankan kekuasaan tersebut.

Sesuai dengan definisi dari Sufri Yusuf, maka tindakan (*action*) Erbakan dalam politik luar negerinya agar sesuai dengan orientasi dan tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatkan kerjasama dengan negara-negara Islam dan mengurangi kerjasama dengan negara-negara Barat.

Kebijakan luar negeri dilaksanakan untuk mencapai suatu tujuan. Menurut Richard C. Snyder<sup>26</sup>, tujuan kebijakan luar negeri adalah suatu “gambaran” keadaan peristiwa di masa depan dan rangkaian kondisi di kemudian hari yang ingin diwujudkan pemerintah melalui pembuatan kebijakan luar negeri dengan menggunakan pengaruh di luar negeri dan dengan mengubah atau mendukung sikap negara lain.

Dalam kajian politik luar negeri, perkembangan dan perubahan, baik yang terjadi di lingkungan internasional (eksternal) dan dalam negeri (internal) suatu negara merupakan faktor-faktor signifikan yang perlu diperhatikan oleh para pengambil keputusan. Secara teoritis, terdapat hubungan korelasional antara perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan eksternal dan internal dengan perubahan-perubahan politik luar negeri suatu negara.<sup>27</sup>

Berdasarkan analisa dari teori diatas maka perubahan politik luar negeri Turki dipengaruhi oleh kondisi politik dalam negeri Turki yaitu kemenangan Partai Islam Refah dalam pemilu 1995. Kemenangan tersebut dianggap kaum sekuler sebagai bangkitnya fundamentalisme Islam. Koalisi sekuler berusaha membendung langkah Erbakan untuk menjabat sebagai perdana menteri, namun koalisi tersebut gagal sehingga Necmettin Erbakan terpilih sebagai Perdana Menteri Turki. Naiknya Erbakan telah merubah politik luar negeri Turki yang semula pro terhadap Amerika Serikat dan Barat menjadi anti-Amerika Serikat, anti-Barat, anti-Zionis dan menjadi lebih “Islamic Oriented” dengan

<sup>26</sup> Richard C. Snyder, dalam K.J Holsti, *Politik Internasional Kerangka Untuk Analisis*, Edisi Keempat, Jilid 1, diterjemahkan oleh M. Thahir Azhari, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1988, hal. 137.

<sup>27</sup> Anak Agung Baryu Perwita, *Politik Luar Negeri AS Pasca Pemilu 1996: Kontinuitas atau Perubahan?*, dalam *Analisis CSIS*, Thn. XXVI No. 6, November-Desember 1997, hal.

meningkatkan kerjasamanya dengan negara-negara Islam yang dimusuhi oleh Amerika Serikat, yaitu Libya, Iran dan Irak.

Menurut Howard H. Lentner, individu tertentu dapat membuat perubahan politik luar negeri.<sup>28</sup> Untuk itu sebagai perdana menteri, Erbakan merupakan aktor politik yang penting di Turki dalam menentukan kebijakan luar negeri yang hendak diambil. Dimana keikutsertaannya dalam merumuskan kebijakan luar negeri itu seringkali dipengaruhi oleh kepentingan pribadi.

Orientasi dan tindakan yang dilakukan Erbakan sebagai pendiri dan pemimpin Partai Islam Refah dipengaruhi oleh latar belakang Erbakan. Erbakan berasal dari keluarga yang terhormat dan keturunan pengikut setia pada zaman Imperium Ottoman. Kakeknya seorang pejabat menteri, sedangkan ayahnya Kepala Peradilan Islam pada zaman Ottoman. Ayahnya menginginkan Erbakan belajar ilmu-ilmu agama tetapi karena Attaturk telah menghapus semua sekolah agama di Turki maka Erbakan mengambil jurusan Teknik Mesin di Universitas Istanbul.<sup>29</sup>

Erbakan memasuki dunia politik di tahun 1969, dengan mencoba mencalonkan diri menjadi anggota parlemen mewakili kotanya Qunieh dan berhasil. Erbakan mendirikan Partai Islam Refah pada tahun 1983, setelah dua kali mengalami kegagalan karena adanya kudeta militer. Refah merupakan satu-satunya partai yang menyerukan adanya pembatasan hubungan dengan Amerika Serikat dan Uni Eropa.<sup>30</sup>

Tindakan Erbakan dalam pelaksanaan politik luar negerinya membuat Amerika Serikat sebagai sekutu utamanya dalam Perang Teluk cemas, karena Erbakan dianggap telah keluar dari jalur yang ditetapkan oleh Gedung Putih. Negara-negara Barat juga merasa khawatir dengan perubahan kebijakan luar negeri Turki yang tentu saja menghambat usaha Turki untuk menjadi anggota penuh Uni Eropa. Bahkan lembaga-lembaga perbankan Amerika Serikat

<sup>28</sup> Howard H. Lentner, *International Politics: Theory and Practice*, West Publishing, New York, 1997, hal. 176.

<sup>29</sup> Kompas, 11 Juli 1996.

<sup>30</sup> *Loc. Cit.*

merencanakan untuk menolak merekomendasikan bantuan untuk Turki sebesar 10 Juta Dollar AS.<sup>31</sup>

## 1.5 Hipotesis

Untuk menjelaskan permasalahan yang telah diajukan maka penulis mengajukan hipotesis, bahwasannya perubahan kondisi politik dalam negeri Turki berpengaruh terhadap perubahan kebijakan luar negerinya terhadap Amerika Serikat:

**Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan orientasi politik luar negeri Turki terhadap Amerika Serikat yaitu kemenangan Partai Refah dalam pemilu 1995 disertai kegagalan koalisi sekuler (Yilmaz-Ciller) dalam pemerintahan yang berakibat pada naiknya Erbakan sebagai Perdana Menteri Turki.**

## 1.6 Metodologi

### 1.6.1 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu tahapan dimana penulis melakukan penelitian terhadap sumber dan data yang dianggap relevan bagi penyelesaian masalah yang telah diajukan. Pengujian hipotesis dari studi ini dilakukan dengan menggunakan metode non-reaktif yakni observasi yang tidak memerlukan reaksi dari objek penelitian. Salah satunya adalah penelaahan secara sistematis atas dokumen, catatan sejarah, berita koran dan segala informasi yang tercatat.<sup>32</sup> Sehingga data yang diperoleh bersifat data sekunder yakni kumpulan laporan dari pihak lain yang sebelumnya berasal dari sumber yang asli. Pengambilan data dilakukan oleh penulis dari:

1. Perpustakaan Pusat Universitas Jember.
2. Perpustakaan FISIP, Universitas Jember.
3. Perpustakaan Universitas Gajah Mada.
4. Departemen Luar Negeri Indonesia di Jakarta.

Penulis juga mengambil dari sumber-sumber data yang lain untuk memperoleh tambahan wawasan yang dapat membantu penulis dalam memecahkan

<sup>31</sup> Setia Budi HP, *op.cit.*, hal. 2.

<sup>32</sup> Mohtar Mas' oed, *op.cit.*, hal 180.

permasalahan yang diajukan, dalam hal ini penulis mengambil data dari *browsing internet*.

### 1.6.2 Metode Analisis Data.

Metode analisis data adalah uraian tentang cara mengkaji data dan mengolah data awal menjadi data atau informasi dan tentang cara analisisnya.<sup>33</sup> Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis menggunakan metode deduktif, bertitik tolak dari pengetahuan yang umum untuk menerangkan peristiwa-peristiwa khusus atau merupakan penjelasan teoritis yang umum atas fakta yang konkrit

Sesuai dengan metode deduktif yaitu pada saat Turki mengalami krisis ekonomi dan ketidakstabilan politik, Partai Refah sebagai satu-satunya partai Islam di Turki memenangkan pemilu yang diselenggarakan pada 24 Desember 1995. Kemenangan tersebut membawa pemimpin partainya Erbakan sebagai Perdana Menteri pertama dari Partai Islam. Naiknya Perdana Menteri Erbakan berakibat pada perubahan orientasi politik baik dalam negeri maupun dalam hubungannya dengan Amerika Serikat, negara-negara Islam, Israel, Uni Eropa dan NATO.

### 1.7 Pendekatan

Untuk mempermudah, mengarahkan dan mempertegas penulisan suatu karya ilmiah, diperlukan suatu pendekatan yang dipakai dalam upaya membantu menganalisis permasalahan.

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah pendekatan Sub-Sistemik atau Analitik dan Pendekatan Personaliti atau *Personality Approach*.

Pendekatan ini berangkat dari asumsi dasar bahwa untuk mengerti keseluruhan dapat dipelajari unsur-unsur dan hubungan unsur-unsur yang dikandung dalam suatu unit analisa. Menurut Kenneth N. Waltz,<sup>34</sup> *The Analytic method...requires reducing the entity to its discrete parts and examining their*

<sup>33</sup> Badan Penerbit UNEJ, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jember, 1998, hal. 18.

<sup>34</sup> Kenneth N. Waltz, *Theory of International Politics*, dalam Tulus Warsito, *Teori-teori Politik Luar Negeri Relevansi dan Keterbatasannya*, Cetakan Pertama, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 1998, hal. 64.

*properties and connections. The whole is understood by studying its elements in their relative simplicity and by observing the relations between them."*

Pendekatan ini menempatkan dimensi internal sebagai pokok analisa dan faktor eksternal dianggap sebagai bersifat sekunder.<sup>35</sup> Dalam kasus Turki pembuatan kebijakan luar negerinya lebih banyak dipengaruhi oleh faktor internal yaitu kondisi politik dalam negeri dibandingkan dengan faktor eksternal yaitu perubahan kondisi politik internasional dari bipolar menjadi multipolar.

Sedangkan pendekatan personaliti atau kepribadian digunakan karena kepribadian merupakan pembawaan yang teratur dan berlangsung terus menerus yang mengakibatkan seseorang menanggapi lingkungannya dengan cara-cara yang khas. Kepribadian, dalam pengertian teknik sama dengan watak atau sifat yang mendasari perilaku ketimbang perilaku itu sendiri. Sedangkan watak yang membentuk tanggapan terhadap stimuli politik disebut sebagai kepribadian politik.<sup>36</sup>

Dalam hal ini pendekatan personality politik digunakan karena naiknya Erbakan yang berasal dari partai Islam sebagai Perdana Menteri Turki telah membawa perubahan dalam kebijakan politik luar negeri Turki terhadap Amerika Serikat. Perubahan tersebut selain dikarenakan kondisi politik yang tidak stabil akibat isu korupsi rezim sekuler juga dipengaruhi oleh kepribadian Erbakan. Sehingga penulis juga mencoba memahami kepribadian Erbakan yang berdampak terhadap kebijakan-kebijakan yang diambilnya.

<sup>35</sup> Wolfram F. Handreider, *Comparative Foreign Policy*, dalam *ibid*, hal. 65.

<sup>36</sup> Jack C. Plano, Roberts Eriggs, Helenan S. Robin, *op.cit.*, hal. 150.



## BAB II

# TINJAUAN KEBIJAKAN POLITIK LUAR NEGERI TURKI SECARA UMUM

### 2.1 Gambaran Umum Politik Luar Negeri Turki

#### 2.1.1 Politik Luar Negeri Turki Pada Masa Perang Dingin

Politik luar negeri pada prinsipnya merupakan suatu iringan kebijaksanaan yang disertai rentetan tindakan yang rumit tetapi dinamis yang ditempuh oleh negara itu dalam hubungannya dengan negara-negara lain atau sebagai kegiatannya dalam organisasi-organisasi regional dan internasional.<sup>1</sup> Dalam hal ini kebijakan luar negeri Turki didasarkan atas konsep pemikiran Mustafa Kemal Pasha, yang mendapat gelar Attaturk bapak pendiri Republik Turki Modern. Prinsip-prinsip kebebasan, kedaulatan, persamaan derajat serta menghormati integritas wilayah dengan tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain merupakan sikap pemerintah Turki yang dijalankan pada masa Perang Dingin.<sup>2</sup>

Secara tradisional Turki memandang dirinya sendiri sebagai negara yang sedang berkembang dengan kekuatan persenjataan yang sedikit dan lebih terfokus pada usaha-usaha untuk menjaga wilayah negaranya dan menjaga keamanan di dalam negeri, bukan ditujukan untuk menunjukkan kekuatan.

Sepanjang Perang Dingin, kebijakan luar negeri Turki ditujukan untuk menjawab beberapa tantangan mendasar yang kompleks dan krusial seperti bagaimana cara untuk menghadapi ancaman Uni Sovyet, bagaimana melindungi kepentingan Turki terhadap Yunani dan Cyprus, serta bagaimana cara untuk tetap memelihara dan memperkuat hubungan Turki dengan Amerika Serikat dan NATO. Selain itu politik luar negeri Turki juga ditujukan untuk menjaga kelangsungan proses

---

<sup>1</sup> Sufri Yusuf, S.H, Hubungan Internasional dan Politik Luar Negeri. Sebuah Analisis Teoritis dan Uraian Tentang Pelaksanaannya, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1989, hal.113.

<sup>2</sup> Laporan Tahunan KBRI di Turki Periode 1990/1991, Departemen Luar Negeri Indonesia, hal. 13.

integrasi Turki dengan negara-negara Eropa Barat dan untuk merumuskan upaya-upaya Turki dalam melawan terorisme yang disponsori oleh negara-negara tetangga Turki seperti Syria, Irak dan Iran. Apalagi pada pertengahan tahun 1970-an Turki mendapat embargo senjata dari Amerika Serikat sehingga semakin menyulitkan proses rekonsiliasi Turki dengan Cyprus dan Yunani, yang telah menjalin hubungan bilateral dengan Amerika Serikat.<sup>3</sup> Posisi geostrategis Turki juga menyulitkan Turki, karena membuat Turki mudah terancam oleh bahaya nuklir, walaupun Turki sendiri telah ikut menandatangani perjanjian pemusnahan senjata nuklir bersama dengan negara-negara anggota NATO. Selain itu pada masa tersebut beribu-ribu rakyat Turki menjadi korban kekerasan politik dan terorisme yang disponsori oleh Uni Soviet untuk mempengaruhi kondisi keamanan dalam negerinya. Bahkan ketika Stalin pasca Perang Dunia II mengklaim wilayah teritorialnya, Turki memilih untuk bergabung dengan kekuatan Barat.

Keputusan yang diambil Turki untuk bergabung dengan negara Barat merupakan keputusan krisis, yaitu keputusan yang dibuat pada situasi yang mengancam, sehingga keputusan tersebut mengandung elemen yang tidak diperhitungkan sebelumnya (surprise) dan diputuskan dalam jangka waktu yang pendek (singkat). Keputusan ini sangat mempengaruhi keamanan dan keselamatan negaranya.<sup>4</sup>

Turki selalu menunjukkan kepada negara-negara tetangganya di kawasan Timur Tengah dan Balkan bahwasannya Turki telah meninggalkan masa lalunya sebagai negara yang imperialis. Pada awal dekade keberadaannya di dunia internasional, Turki memiliki sedikit kepentingan dengan negara-negara Timur Tengah itupun hanya untuk bersahabat bukan untuk memusuhi. Bagi Turki dunia Arab merupakan masa lalu yang hendak dilupakan. Tetapi di kemudian hari ketika

---

<sup>3</sup> Alan Makovsky and Sabri Sayari, eds., *Turkey's New World*. .op.cit., hal. 1.

<sup>4</sup> May Rudy, *Studi Strategis dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin*, Cetakan Pertama, Anggota IKAPI, PT Refika Aditama, Bandung, 2002, hal. 27.

Syria dan Irak menjalin hubungan dengan Soviet, Turki memiliki alasan yang kuat untuk memusuhi mereka.

Kawasan di sekitar Turki merupakan kawasan yang tidak stabil, kawasan Caucasus dan Asia Tengah berada di bawah kontrol Uni Sovyet, sedangkan kawasan Balkan berada dalam kontrol Presiden Tito dari Yugoslavia dan berada di bawah pengaruh ancaman Perang Dingin. Timur Tengah sendiri merupakan kawasan yang paling tidak stabil karena seringkali terjadi perang. Walaupun Turki tidak senang dengan tingkah laku negara-negara tetangganya tersebut, tetapi Turki seringkali menjadikan mereka sebagai partner, sebagian untuk menutupi kelemahannya dan sebagian sebagai partner dagang. Turki juga mengharapkan agar dukungannya terhadap bangsa Arab, yaitu permasalahan Palestina akan dibayar dengan dukungan terhadap Turki atas permasalahannya dengan Cyprus.

### **2.1.2 Politik Luar Negeri Turki Pasca Perang Dingin**

Dengan berakhirnya Perang Dingin, dunia masuk pada era yang penuh dengan ketidakpastian. Hal yang menyebabkan timbulnya ketidakpastian pada masa pasca Perang Dingin ini adalah peralihan ke era ini tidak melalui sesuatu konfrontasi militer tertentu dan tidak melalui perundingan pasca perang seperti saat berakhirnya Perang Dunia kedua. Disamping itu dunia juga menyaksikan timbul maupun runtuhnya kekuatan-kekuatan besar, dan semakin cepatnya perubahan-perubahan di bidang teknologi, ekonomi dan budaya. Sumber timbulnya konflik juga menjadi tidak pasti. Apabila dalam era Perang Dingin sumber konflik sebagian berasal dari perbedaan ideologi, maka pada era pasca Perang Dingin sumber konflik lebih kompleks dan beragam.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Riri Dwianto, "Kerja Sama Keamanan Asia Timur", dalam Bantarto Bandoro, Agenda dan Penataan Keamanan di Asia Pasifik, 1996, hal. 182.

Runtuhnya Tembok Berlin pada 9 November 1989 dan bersatunya Jerman Barat dengan Jerman Timur pada 3 Oktober 1990 serta runtuhnya Uni Soviet pada 25 Desember 1991 yang membuat mundurnya Mikhail Gorbachev sebagai kepala negara merupakan akhir dari Perang Dingin<sup>6</sup> yang telah merubah konstelasi politik internasional dari sistem bipolar dengan dua kekuatan utama Amerika Serikat versus Uni Soviet, menjadi multipolar. Turki tidak lagi mengalami ketakutan akibat tuntutan Uni Soviet terhadap wilayahnya namun Turki juga mengalami kekhawatiran bahwasannya Turki akan kehilangan keuntungan dari Amerika Serikat dan negara-negara Barat akibat tidak adanya lagi konfrontasi dengan Uni Soviet dan Pakta Warsawa. Namun kondisi geografis Turki menjadi penting seiring dengan perannya dalam Perang Teluk.

Invasi Irak terhadap Kuwait pada tanggal 2 Agustus 1990 yang disebut sebagai Perang Teluk telah memberikan dampak langsung terhadap Turki, baik ekonomi maupun politik. Pada awal terjadinya krisis di kawasan ini, Turki mengambil sikap yang sama dengan negara-negara Barat dan Amerika Serikat, yaitu:<sup>7</sup>

1. Mengutuk invasi dan aneksasi Irak terhadap Kuwait
2. Menerapkan sanksi embargo yang diberlakukan oleh PBB dengan menutup saluran ekspor minyak Irak yang melalui Turki ke pelabuhan di laut Mediterania, melarang segala macam ekspor barang ke Irak kecuali makanan dan obat-obatan dan membekukan semua aset Irak dan Kuwait yang ada di Turki.
3. Menuntut Irak untuk segera menarik diri dari Kuwait.
4. Menuntut pengembalian pemerintahan yang sah di Kuwait, yaitu pemerintahan El Sabah.

Turki juga memberikan ijin kepada Amerika Serikat /NATO untuk menggunakan pangkalan militernya yang digunakan untuk menyerang Irak.

<sup>6</sup> Juwono Sudarsono, *op.cit.*, hal. 3.

<sup>7</sup> Laporan Tahunan KBRI 1990/1991, *op.cit.*, hal. 14.

Penyerangan dari pangkalan di Incirlik maupun pangkalan di Batman ke wilayah utara Irak sangat efektif dan merepotkan Irak. Keterlibatan Turki dalam Perang Teluk ini mengundang reaksi dari dalam negeri maupun luar negeri. Sebagian besar rakyat Turki menentang keterlibatan Turki dalam Perang Teluk, bahkan beberapa partai oposisi juga menyatakan ketidaksenangannya terhadap keputusan Turki. Negara-negara di kawasan antara lain Libya, Aljazair, Iran, Maroko dan Yordania memberikan reaksi keras dan meminta Turki untuk menutup pangkalan udaranya yang digunakan Amerika Serikat untuk menyerang Irak.<sup>8</sup>

Namun berakhirnya Perang Teluk membawa dampak positif terhadap Turki, yaitu naiknya kredibilitas Turki di dunia internasional, khususnya negara-negara Barat dan Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat, George Bush, beberapa kali menyatakan penghargaannya kepada Presiden Turgut Ozal atas partisipasi Turki selama Perang Teluk. Turki dianggap sebagai sekutu NATO yang terpercaya dan dinilai dapat digunakan sebagai mediator bagi hubungannya dengan negara-negara di Timur Tengah. Sebaliknya negara-negara Timur Tengah-pun berusaha memanfaatkan Turki sebagai partner yang terpercaya dalam hubungannya dengan negara-negara Barat, mengingat mayoritas penduduk Turki beragama Islam dan mempunyai hubungan historis.<sup>9</sup>

Turgut Ozal yang terpilih sebagai Presiden Turki pada tahun 1989 selalu mendorong dan menekankan politik luar negeri Turki yang lebih aktif. Proses pendekatan Barat-Timur memberikan dampak positif terhadap Turki untuk lebih meningkatkan hubungan dengan negara-negara Blok Timur dalam aspek ekonomi. Turki bahkan mendukung kemerdekaan negara-negara bekas Uni Soviet dan berusaha menciptakan lingkungan pengaruh bagi kekuatan Turki di wilayah bekas Uni Soviet, terutama terhadap negara-negara yang mayoritas memiliki kesamaan bahasa dan hubungan historis dengan rakyat Turki melalui peningkatan perdagangan, proyek

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hal. 15.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hal. 16.

kerjasama di bidang energi dan mengadakan pertemuan-pertemuan yang dilakukan secara rutin dengan negara-negara tersebut.<sup>10</sup>

Turki secara aktif juga mengupayakan penciptaan hubungan bilateral dengan negara-negara dikawasannya, yaitu dengan berperan secara aktif dalam lembaga *Arms Control and Regional Security* yang berfungsi menjaga proses perdamaian multilateral di Timur Tengah dan berperan sebagai penggagas dan penyelenggara ide-ide seperti pengiriman tentara penjaga perdamaian di kawasan Balkan dan menjalin kerjasama ekonomi dengan negara-negara di kawasan Laut Mati (*Black Sea Economic Cooperation Zone*).<sup>11</sup>

Dalam proses menjaga perdamaian di Timur Tengah setelah Perang Teluk berakhir, Turki berusaha untuk ikut serta memainkan peran yang lebih baik dan lebih besar. Hal ini terlihat dari aktivitas politik luar negeri Turki sepanjang tahun 1994 yang melakukan kunjungan ke negara-negara Timur Tengah termasuk Israel dan keikutsertaan Turki dalam *Summit* di Casablanca. Bahkan pada awal Maret 1996 Presiden Suleyman Demirel melakukan kunjungan ke Israel, kedua negara sepakat untuk melakukan berbagai kerjasama, termasuk perjanjian kerjasama militer dan pertahanan yang digunakan untuk menghadapi bangkitnya fundamentalisme Islam di Turki. Sikap baru Turki ini juga digunakan untuk memperkuat posisinya terhadap negara-negara disekitarnya khususnya Yunani dan Syria.<sup>12</sup> Namun dari segi ekonomi tampaknya Turki masih belum bisa mengambil keuntungan maksimal terhadap *peace process* di Timur Tengah sebelum negara-negara Arab menyelesaikan permasalahannya dengan Israel.

Turki bersama-sama dengan Syria dan Iran memiliki Komite bersama untuk menjembatani isu-isu yang menyangkut hubungan ketiga negara khususnya mengenai pemantauan perbatasan terhadap lalu lintas PKK. Meskipun Turki masih merasa

---

<sup>10</sup> Alan makovsky, *Turkey's New World...*, *op.cit.*, hal. 1.

<sup>11</sup> *loc.cit.*

<sup>12</sup> Laporan Tahunan KBRI di Turki Periode Tahun 1995/1996, Departemen Luar Negeri Indonesia, hal. 5.

curiga terhadap Syria, karena menganggap Syria telah melindungi pemimpin PKK Abdullah Ocalan.

Untuk memperbaiki hubungan Turki dengan Irak, Turki melancarkan *diplomatic move* pada bulan September 1994 dengan mengusulkan pengurangan sanksi embargo terhadap Irak. Apalagi dari sudut ekonomi Turki mengalami kerugian terhadap sanksi tersebut yang mengakibatkan supply minyak dari pipa Kirkuk-Yumurtalik di Irak terhenti dan kerugian terhadap perdagangan dengan Irak selama ini diperkirakan lebih dari 20 Milyar Dollar AS, sedangkan kompensasi yang diberikan terhadap kerugian tersebut oleh sekutu Turki pada saat Perang Teluk tidak memadai.<sup>13</sup>

Hubungan Turki dengan Rusia dipenuhi dengan kecurigaan dari kedua belah pihak. Usaha Turki menggalang kerjasama dengan negara-negara Asia Tengah: Azerbaijan, Turkmenistan, Kyrgyzstan, Uzbekistan dan Kazakhstan dalam *Forum Turkic Summit* yang memiliki persamaan etnis dan kebudayaan dengan Turki dicurigai Rusia sebagai ambisi Turki untuk memperluas pengaruh dan menggrogoti pengaruh Rusia di kawasan tersebut.

Di lain pihak Turki masih melihat Rusia merupakan ancaman yang serius mengingat *near abroad policy* yang dianut Rusia dipandang berbau ekspansionisme. Ditambah dengan sikap Rusia terhadap permasalahan Nagorno-Karabakh yang membela Armenia, juga masalah Chechnya. Kesulitan Turki mengambil sikap keras dalam masalah Chechnya terletak pada masalah Kurdi di tenggara Turki yang dapat digunakan Rusia sebagai alasan untuk membalas Turki jika mencampuri sikap Rusia terhadap Chechnya yang menjadi urusan dalam negeri Rusia. Selain itu, di Rusia sendiri terdapat orang-orang Kurdi yang mudah dipolitisir kegiatannya oleh Rusia.

Akan tetapi, kedua negara memiliki kepentingan dibidang perdagangan dengan volume yang cukup besar, termasuk supply energi Rusia ke Turki

---

<sup>13</sup> Laporan Tahunan KBRI di Turki Periode Tahun 1994/1995, Departemen Luar Negeri Indonesia, hal. 14.

Nagorno-Karabakh yang berpenduduk mayoritas keturunan Armenia berada dalam wilayah Azerbaijan adalah merupakan sumber konflik antara Armenia dan Azerbaijan. Armenia mengklaim wilayah tersebut sebagai bagian dari wilayahnya. Konflik bersenjata kedua negara tersebut telah dimulai sejak tahun 1989. Bahkan pada bulan Februari 1993, 13 desa Azerbaijan direbut tentara Armenia termasuk bendungan dan sumber air yang sebelumnya memasok listrik ke Nagorno-karabakh.

Konflik senjata yang semakin memuncak telah mendorong Turki dan dunia internasional untuk mendamaikan pertikaian tersebut. Pemerintah Turki menilai pertikaian tersebut akan mengganggu stabilitas di kawasan, sehingga Turki berupaya mengadakan dialog dengan negara-negara di kawasan. Bahkan Presiden Demirel dalam kunjungan resminya ke Moskow pada tanggal 25 Mei 1992 mengadakan pembicaraan khusus dengan Presiden Rusia, Boris Yeltsin, berkenaan dengan perkembangan yang terjadi di Nagorno-Karabakh. Turki mengkhawatirkan bahwa perang Armenia-Azerbaijan akan berkembang menjadi konflik Islam-Kristen seperti yang terjadi di Lebanon.

Hubungan Turki dengan Armenia sangat buruk karena terlalu banyak ganjalan-ganjalan yang menghambat kedua negara untuk menjalin hubungan bertetangga yang baik, meskipun Turki merupakan salah satu negara pertama yang mengakui kemerdekaan Armenia ketika negara tersebut memproklamkan kemerdekaannya terpisah dari Uni Sovyet. Namun sampai saat ini Turki menahan diri untuk tidak membuka perwakilan diplomatiknya di Armenia. Hambatan-hambatan berkembangnya hubungan kedua negara antara lain disebabkan.<sup>14</sup>

1. Turki mengancam keras agresi Armenia terhadap wilayah Azerbaijan di Nagorno-Karabakh.

---

<sup>14</sup> Laporan Tahunan KBRI di Turki Periode Tahun 1993/1994, Departemen Luar Negeri Indonesia, hal. 25.

2. Turki menuduh adanya bantuan dan dukungan Armenia terhadap kelompok teroris Kurdi (PKK),
3. Adanya klaim Armenia terhadap wilayah Turki di bagian utara

Perbaikan hubungan antara kedua negara tersebut pernah dibahas ketika Presiden Armenia Petrosian berkunjung ke Turki untuk menghadiri pemakaman almarhum Turgut Ozal pada bulan April 1993. Namun serangan Armenia yang semakin gencar terhadap wilayah Azerbaijan di Nagorno-Karabakh kembali mementahkan upaya perbaikan hubungan kedua negara. Turki menghentikan bantuan kemanusiaan ke wilayah Armenia dengan menutup koridor penerbangannya ke Armenia, apalagi sikap Armenia yang masih mempersoalkan tuduhan "genocide" yang dilakukan Turki pada masa Ottoman,<sup>15</sup> ditambah hubungan baik antara Turki dengan Azerbaijan yang membuat hubungan Turki dengan Armenia semakin dingin.

Turki secara vokal juga mendukung perjuangan rakyat Bosnia-Herzegovina semenjak awal meletusnya konflik tersebut, dan berupaya agar dunia internasional bertindak lebih konkrit untuk menghentikan agresi Serbia terhadap kaum muslim di Bosnia. Turki bahkan berupaya mengusulkan *Action Plan* kepada negara-negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB pada bulan Agustus 1992, yang memuat dua point, yaitu komponen militer yang mencakup usulan untuk melakukan suatu intervensi militer terbatas (*Limited Air Strikes*) dan komponen diplomasi.

Bahkan Perdana Menteri Suleyman Demirel dalam pertemuannya dengan anggota-anggota Parlemen Inggris di London pada tanggal 23 November 1992 menyatakan bahwa jika peperangan di Bosnia-Herzegovina tidak dihentikan secepatnya maka akan terjadi "holocaust" di Balkan. Untuk itu sanksi PBB harus tegas diterapkan dan meminta kepada PBB agar embargo senjata terhadap bekas Yugoslavia mengecualikan Bosnia-Herzegovina.

---

<sup>15</sup> Armenia menuduh Turki atas genocide (pembunuhan massal) terhadap 1,5 Juta orang Armenia yang terjadi antara tahun 1915-1923. Bahkan di Kongres Amerika Serikat muncul "Armenian Bill" yang diajukan oleh Senator Robert Dole dan meminta persetujuan kongres supaya pada tanggal 24 April 1990 dianggap sebagai "hari peringatan ulang tahun ke 75 pembunuhan massal orang-orang Armenia. Laporan Tahunan 1990/1991, *op.cit.*, hal. 16.

Melalui wakil tetapnya di PBB, yang juga Ketua *Organization of Islamic Countries (OKI) Contact Group on Bosnia-Herzegovina*, Turki meminta Dewan Keamanan PBB untuk mengadakan sidang darurat mengenai masalah Bosnia-Herzegovina. Presiden Ozal juga mengadakan pembicaraan dengan pemimpin negara-negara Balkan (Bulgaria, Kroasia, Albania dan Macedonia) dalam rangka mengupayakan tercapainya perdamaian di Bosnia-Herzegovina.<sup>16</sup>

Upaya Presiden Ozal tersebut dianggap Serbia sebagai upaya untuk menghasut negara-negara tersebut agar memusuhi Serbia bahkan pemerintah Serbia menganggap Turki telah mencampuri urusan dalam negerinya dan meningkatkan ketegangan yang dapat menimbulkan peperangan di kawasan.

Kemunduran hubungan Turki dengan negara-negara Barat semakin terlihat jelas ketika negara-negara Uni Eropa menunda keanggotaan Turki yang dianggap secara politis belum setara dengan Uni Eropa, karena rendahnya tingkat hak asasi manusia dan tingkat demokrasi serta ekonomi Turki. Ditambah dengan penundaan pembicaraan mengenai pelaksanaan Custom Union<sup>17</sup> dengan Uni Eropa sampai bulan Maret 1995 mempertajam hubungan Turki dengan Uni Eropa.

Sedangkan dalam bidang keamanan status Turki untuk menjadi anggota penuh Western European Union juga tertunda dikarenakan Turki harus menjadi anggota penuh Uni Eropa terlebih dahulu.

Hubungan Turki dengan negara-negara Barat mengalami perkembangan ketika negara-negara anggota Uni Eropa dan Amerika Serikat mendukung terwujudnya Custom Union antara Turki-Uni Eropa. Pada umumnya terdapat 14 negara Uni Eropa yang mendorong ditandatanganinya perjanjian Custom Union dan

---

<sup>16</sup> Laporan Tahunan KBRI di Turki periode tahun 1992/1993, Departemen Luar Negeri Indonesia, hal., 22.

<sup>17</sup> Custom Union adalah sebuah perjanjian diantara beberapa negara untuk menyelenggarakan perdagangan bebas diantara sesama negara anggota penandatanganan perjanjian serta mengenakan bea tarif yang seragam terhadap setiap barang impor dari negara diluar anggota penandatanganan perjanjian tersebut. Custom Union mendorong perluasan kegiatan perdagangan diantara negara anggotanya dengan menghapuskan setiap hambatan terhadap kegiatan perdagangan dan spesialisasi produksi. Lihat dalam Jack C. Plano dan Roy Olton, *Kamus Hubungan Internasional*, diterjemahkan oleh Wawan Juanda, Putra A. Bardin, Jakarta, 1999, hal. 102.

melakukan tekanan terhadap Yunani, sebagai satu-satunya negara anggota Uni Eropa yang selalu mem-veto Custom Union Turki-Uni Eropa. Yunani bahkan mengkaitkan masuknya Cyprus ke dalam Uni Eropa sebagai pengganti dicabutnya veto tersebut. Akhirnya Turki dan Uni Eropa menandatangani perjanjian Custom Union pada tanggal 6 Maret 1995 dengan dicabutnya veto Yunani. Dan Uni Eropa menjanjikan kepada Yunani untuk memulai pembicaraan mengenai keanggotaan Cyprus dalam Uni Eropa setelah *Intergovernmental Conference* pada pertengahan tahun 1996.<sup>18</sup>

Berhasilnya Turki menandatangani perjanjian Custom Union merupakan kemenangan politis bagi Turki atas Yunani. Bahkan Uni Eropa juga menginginkan pembicaraan mengenai keanggotaan Cyprus dalam Uni Eropa diwakili oleh kedua masyarakat Cyprus yang kini terpecah *Turkish-Cypriot*/utara dan *Greek-Cypriot*/selatan (*bicommunal delegation*).<sup>19</sup> Hal ini sebenarnya memang dikehendaki oleh Turki mengingat Yunani mendesak Uni Eropa untuk membicarakan keanggotaan Cyprus dan kecenderungan Greek-Cypriot menjadi wakil dari seluruh Cyprus. Karena itu, Turki pernah mengancam akan mengintegrasikan Cyprus Utara jika hal itu terjadi.

Sebenarnya, bagi Turki sendiri Cyprus merupakan suatu beban politik dan keuangan. Secara politis masalah Cyprus menjadi penghambat Custom Union Turki-Uni Eropa, sedangkan Turki sudah terlibat terlalu dalam di Cyprus. Perdana Menteri Ciller sendiri menyatakan bahwa secara ekonomi Turki masih membantu Cyprus dan harus membiayai tentaranya yang ada di Cyprus Utara. Padahal kondisi ekonomi Turki mengalami penurunan sehingga Turki menginginkan masalah Cyprus selesai.

Selain masalah Cyprus, Turki dan Yunani selalu memiliki perbedaan pendapat. Seperti pada saat Turki turut serta dalam pasukan perdamaian PBB dan UN Profor di Bosnia-Herzegovina, Yunani menuduhnya sebagai kembalinya ekspansionisme Ottoman di wilayah Balkan, karena terdapat banyak penduduk

---

<sup>18</sup> Laporan Tahunan Periode KBRI Periode 1994/1995, *op.cit.*, hal. 18.

<sup>19</sup> *Loc.cit.*

keturunan Turki di wilayah Balkan termasuk Bosnia sebagai peninggalan Ottoman-Turki yang menaklukan wilayah tersebut 500 tahun yang lalu. Bagi Turki sendiri Yunani merupakan salah satu ancaman selain Rusia.

Semakin tajamnya perbedaan antara Turki dengan Yunani mengundang kekhawatiran negara-negara anggota NATO dan Uni Eropa. Karena itu negara-negara NATO dan Uni Eropa menghimbau agar kedua negara mengurangi ketegangan dan melakukan pendekatan baru untuk perdamaian.

## **2.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Politik Luar Negeri Turki**

Politik luar negeri dari tiap-tiap negara pada dasarnya mempunyai tujuan yang sama, yaitu mencapai dan mempertahankan kepentingan nasional masing-masing. Kepentingan nasional utama bagi tiap-tiap negara adalah menjaga keamanan dan eksistensinya, serta mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Tujuan tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor dalam usaha pencapaiannya. Terutama faktor lingkungan, baik itu dari dalam negeri maupun dari dunia internasional. Faktor-faktor tersebut dapat berupa faktor lingkungan fisik maupun non fisik. Hal-hal tersebut dapat membatasi ruang gerak negarawan dan politisi suatu negara. Faktor lain yang mempengaruhi adalah persepsi para negarawan dan politisi suatu negara yang bersangkutan. Sehingga pada hakekatnya perumusan kebijakan luar negeri adalah kombinasi dari faktor-faktor fisik dan non fisik, dalam dan luar negeri serta persepsi pribadi para pengambil keputusan. Hal tersebut terjadi pula pada Turki. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi politik luar negeri Turki antara lain.

### **2.2.1 Faktor Fisik**

#### **A. Kondisi Geografis**

Faktor paling stabil yang merupakan andalan kekuatan dari suatu negara adalah letak geografisnya. Letak geografis suatu negara merupakan faktor tetap yang

menentukan posisi suatu negara di dunia, dan merupakan suatu bahan pertimbangan bagi pelaksanaan politik luar negeri suatu negara.<sup>20</sup>

Letak geografis Turki di deretan negara-negara semenanjung Balkan memiliki posisi strategis antara Eropa dan Timur Tengah. Dan sering disebut sebagai *Powder Keg of Europe* (Tong Mesiu Eropa), karena seringnya meletus peperangan di kawasan tersebut. Turki menjadi tempat yang strategis, karena merupakan pintu gerbang Eropa menuju Timur Tengah, melewati selat-selat vital yang menghubungkan Laut Hitam dan Laut Tengah.<sup>21</sup>

Wilayah Turki terletak di sebelah tenggara Eropa dikelilingi oleh dataran tinggi, sedangkan dataran rendah terdapat di sepanjang garis pantai. Dengan dataran tinggi yang mengelilinginya, Turki memiliki benteng-benteng alami bagi pertahanan wilayahnya apabila mendapat ancaman dari luar. Sehingga secara geopolitik patut diperhitungkan.

Jalan air (perairan) yang menjadi bagian teritorialnya menambah keunggulan geografis karena dilalui jalur yang sangat strategis dan penting. Yaitu Laut Dardanella sepanjang 64 km, Laut Marmara dan selat Bosporus dengan panjang selat 32 km. Kesemuanya membentuk rute air yang menghubungkan Laut Hitam dan Mediterania.<sup>22</sup>

Turki memiliki garis perbatasan sepanjang 2628 km di darat dan 7168 km pada garis pantai. Pada bagian daratan Eropa berbatasan dengan Bulgaria (batas utara) dan di laut dibatasi oleh Laut Hitam. Di sebelah selatan berbatasan dengan Laut Marmara dan Dardanella, dan di sebelah barat berbatasan dengan Yunani dan Laut Aegean. Sedangkan pada bagian Asia, sebelah utara berbatasan dengan Georgia dan Laut Hitam, di sebelah timur berbatasan dengan Armenia dan Iran, di sebelah

---

<sup>20</sup> Hans J. Morgenthau, *Politik Antar Bangsa*, Edisi Keenam, Buku Pertama, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1990, hal. 170.

<sup>21</sup> Kompas, 10 Juni 1996.

<sup>22</sup> *Turkey (Country)*, *Encarta 99 Encyclopedia*, 1993-1998, Microsoft Corporation.

selatan berbatasan dengan Irak, Syria dan Laut Mediterania, dan di sebelah Barat berbatasan dengan Laut Aegean.<sup>23</sup>

Wilayah Turki terbentang sepanjang 2628 km di darat dan lebar kira-kira 480 km, serta menempati kurang lebih 779.452 kilometer persegi. 755.768 km persegi berada di Asia dan 23.764 kilometer persegi berada di Eropa. Apabila dibandingkan dengan wilayah kekuasaan Daulat Utsmaniyah yang memanjang dari Maghribi hingga Jaziriah Arab kini tinggal sebagian saja. Hampir seluruh Turki atau kurang lebih 97 % terletak di Asia merupakan jaziriah raksasa disebut Anatolia dalam bahasa Yunani atau Anadolu dalam bahasa Turki yang berarti "matahari sedang terbit". Nama lain daerah ini adalah Asia kecil. Sedangkan bagian Eropa Turki sekitar 3 % disebut Thrace.

Karena posisi Turki yang strategis maka banyak dimanfaatkan oleh beberapa negara, termasuk Amerika Serikat dan NATO yang menggunakan pangkalan militer Turki di Incirlik untuk menyerang Irak pada saat Perang Teluk.

### **B. Kekayaan Alam**

Turki merupakan tempat terpenting didunia sebagai penghasil mineral dan bahan tambang, seperti: lignite, batu bara, minyak, krom, bauksit, besi, mangan, boron, antimony, tembaga, timah dan sulfur. Sumber minyak, boron, tembaga dan perak banyak ditemukan di sebelah tenggara Turki, krom banyak ditemukan didekat wilayah Guleman dan Fethiye, besi magnet ditemukan diwilayah Diuriyi sedangkan timah menyebar di beberapa wilayah. Bahkan pada bulan April 1995, Azerbaijan dan Turki mengadakan kerjasama bilateral atas pembangunan ladang minyak di bawah Laut Kaspia.<sup>24</sup>

Turki juga merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, dibidang pertanian hasil panen utamanya adalah gandum, sebesar 18,5 miliar ton ditahun 1996, gula bit sebesar 14,3 miliar ton dan gerst sebesar 8 miliar ton. Dibidang peternakan, ternak utama Turki adalah biri-biri, sapi dan kambing. Sedangkan lebih dari 550.000

---

<sup>23</sup> Loc. Cit.

ton ikan ditangkap setiap tahunnya, sebagian besar hasil ikan diperoleh dari Laut Mediterania dan Laut Hitam.

Dari hasil pertaniannya Turki banyak mengekspor buah-uahan dan sayuran serta gandum, karena Turki mampu mencukupi kebutuhan penduduknya dengan kekayaan alamnya dan produk yang dihasilkannya. Tetapi Turki juga masih banyak melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan penduduknya.

### C. Penduduk

Pada tahun 1996, populasi Turki adalah 62.697.000 jiwa. Pesatnya peningkatan urbanisasi menyebabkan sekitar 69 % penduduk tinggal di kawasan urban, dibandingkan dengan 25 % pada tahun 1945. Populasi tertinggi terkonsentrasi di Istanbul, sekitar 12 Juta dan di wilayah pantai. Beberapa kota utama, seperti Ankara, ibukota negara, Izmiir, Adana dan Bursa juga dipadati penduduk. Kepadatan penduduk rata-rata pada tahun 1995 adalah 206 orang per-kilometer persegi. Lebih dari separuh penduduknya adalah kaum muda yang berumur di bawah 25 tahun.<sup>25</sup>

Karena komposisi penduduknya yang tergolong muda, urban dan dinamis, Turki sekilas seperti bangsa yang berprospek cerah. Namun pemandangan di belahan timur tampak sangat berbeda. Orang-orangnya lebih miskin, jalanan rusak dan daerah yang baru dibangun lebih menyerupai kamp pengungsi. Di selatan yang berbatasan dengan Iran, Irak dan Armenia, akan mudah ditemukan hukum darurat perang, pendudukan militer dan perang saudara. Sehingga Turki digambarkan kaum Barat sebagai satu tubuh yang jika kepala dan tubuhnya digerakkan untuk memasuki dunia pasar global, maka kakinya tetap berpijak pada kenyataan sejarah masa lampau, geografi, perang dan kemiskinan.<sup>26</sup>

Mayoritas penduduk Turki adalah beretnis Turki, sedangkan yang lainnya beretnis Kurdi, Arab, Circassia, Yunani, Armenia, Georgia dan Yahudi. Diantara etnis-etnis tersebut, etnis Kurdi dan Armenia yang paling kuat mempertahankan

---

<sup>24</sup> Loc. Cit

<sup>25</sup> Loc. Cit

identitasnya setelah Turki mengalami Turkifikasi. Etnis Kurdi berjumlah sekitar 20 juta jiwa tetapi jumlah yang paling diakui pemerintah kurang lebih 11 juta jiwa atau sekitar 17 % dari seluruh penduduk Turki.<sup>27</sup>

Hubungan Turki dengan etnis Kurdi dan Armenia banyak mempengaruhi hubungan Turki dengan negara-negara tetangganya seperti Irak, Iran dan Syria yang juga banyak etnis Kurdinya. Karena Turki seringkali beranggapan bahwa negara tetangganya tersebut menyembunyikan pemimpin PKK dan mendukung gerakan negara Kurdi. Sedangkan hubungan Turki dengan Armenia juga tidak pernah baik, hal ini dikarenakan adanya tuduhan Armenia terhadap Turki atas genocide (pembunuhan massal) 1,5 juta orang Armenia pada tahun 1915-1923.

## 2.2.1 Faktor Non Fisik

### A. Ideologi

Ideologi adalah suatu pandangan atau sistem nilai yang mencakup segenap nilai hidup dan kehidupan bangsa serta negara yang bersifat saling berhubungan dan saling tergantung atau secara moral dipandang benar dan adil, yang mengatur berbagai elemen hubungan sosial dan perilaku duniawi masyarakat pendukungnya. Turki merupakan negara yang menganut ideologi sekuler, yang memisahkan antara agama dengan negara. Agama diakui tetapi harus dipisahkan dari negara agar tidak dimanipulasi untuk kepentingan politik. Demikian dan sebaliknya untuk menghindari terjadinya manipulasi politik untuk kepentingan agama. Negara sekuler lebih menekankan pada pembangunan dunia, tetapi tidak mengabaikan agama.<sup>28</sup>

Dari 54 negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, hanya Turki yang berideologi sekuler. Setiap warga negaranya mempunyai kebebasan untuk beragama sesuai dengan keinginan dan kepercayaannya masing-masing. Mereka juga

---

<sup>26</sup> *Agenda Panjang Islamisasi Turki*, *Ishlah* No. 62/Thn.IV, 1996, hal. 60-61.

<sup>27</sup> *Tawaran Refah Untuk Citra Turki*, *Ummat*, No. 2 tahun II, 22 Juli 1996, hal. 52-54.

<sup>28</sup> *Kompas*, 29 April 1997.

harus menghormati kebebasan untuk beribadat sesuai dengan agama dan kepercayaannya.

Dengan ideologi sekuler maka Turki dalam pembangunan negaranya dan dalam penentuan kebijakan luar negerinya lebih condong ke Barat dibandingkan ke Timur atau negara-negara Islam meskipun mayoritas penduduk Turki muslim. Hal ini dilakukan agar Turki tidak kembali kekejayaan Ottoman dengan ideologi Islamnya.

### **B. Struktur Sosial Masyarakat Turki**

Wilayah Turki secara etnis dan kultural terdiri dari kelompok-kelompok yang berbeda, dari Hitittie lama, Phrygria, Assyiria, sampai Yunani, Persia, Romawi dan Arab. Kelompok Nomadic Forebears Turki modern keluar dari Asia Tengah pada abad 11, menaklukan kekaisaran Arab dan Byzantium, dan menyatakan diri sebagai penguasa. Kedatangan mereka memberikan ciri yang berbeda terhadap bahasa dan kebudayaan Turki dari penduduk yang telah ada di wilayah tersebut. Perbedaan tersebut masih terlihat dalam kehidupan Turki modern saat ini, baik dalam bahasa, agama, etnis maupun budaya.

Bahasa resmi Turki adalah bahasa Turki, tetapi ada sekitar 10 sampai 15 persen dari penduduk yang berbicara dalam bahasa ibu yang berbeda, terutama bahasa Kurdi dan bahasa Arab.<sup>29</sup>

Pada tahun 1928, Ataturk mengeluarkan dekrit untuk menggunakan huruf Romawi yang disesuaikan dengan bahasa Turki. Semenjak itu dilakukan purifikasi bahasa Turki dengan menghilangkan pemakaian, bahkan mengorbankan bahasa Arab. Hasilnya, mulai tahun 1932, adzan dilafalkan dalam bahasa Turki shalat juga harus menggunakan bahasa Turki.<sup>30</sup>

Meskipun Islam telah dihapuskan sebagai agama resmi negara sejak 1928, 99 % dari penduduk Turki secara nominal adalah muslim. Sebagian besar adalah Muslim Sunni, meskipun ada sejumlah penganut Syiah, terutama di bagian tenggara yang

---

<sup>29</sup> *Loc. cit.*

<sup>30</sup> Bernard Lewis, *Bahasa Politik Islam*, Gramedia, Pustaka Utama, Jakarta, 1994, hal xxiv-xxv.

berbatasan dengan Iran. Menurut data tahun 1995 penganut Kristen sekitar 0,1 % dari jumlah penduduk, dan komunitas Yahudi berjumlah sekitar 25.000 orang.<sup>31</sup>

Sistem pendidikan di Turki merupakan suatu sistem sekolah modern yang diperkenalkan oleh Atatürk dan dilanjutkan oleh para penggantinya, yang berdasar pada model Eropa. Pada awal Republik, lebih dari 90 % penduduk buta huruf. Konstitusi pertama yang dikeluarkan pemerintah Atatürk menyebutkan bahwa pendidikan dasar merupakan kewajiban bagi semua penduduk Turki dan gratis di sekolah-sekolah negeri. Pada pertengahan tahun 1990-an sekitar 4/5 dari seluruh penduduk dewasa di Turki dapat membaca dan menulis. Kebudayaan mengalami transisi dari tradisi artistik Islami ke arah yang lebih sekuler, di mana budaya berorientasi Barat secara perlahan mengambil alih dan memperoleh tempat di Turki. Sehingga kebudayaan pribumi terancam punah dan Turki banyak melakukan hubungan dengan negara-negara Barat seperti menjadi anggota NATO, dibandingkan berhubungan dengan negara-negara Islam.

### C. Struktur Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dan investasi berjalan lambat, sedangkan pengangguran tumbuh pesat. Seiring dengan resesi dunia pada pertengahan 1970-an, yang menyebabkan penurunan tajam pengiriman dana dari pekerja Turki di Eropa Barat, dan sebagian disebabkan kenaikan barang-barang import, khususnya minyak dan makanan jadi. Turki pada saat itu juga terjerat oleh banyaknya utang luar negeri yang tidak dapat dibayar. Untuk melunasi utang dari para kreditor, Turki membutuhkan pinjaman baru dari *International Monetary Fund* (IMF), sebuah konsorsium pemberi pinjaman dari Uni Eropa dan Amerika Serikat. Pinjaman ini dihubungkan dengan dijalankannya program penghematan ekonomi (1978), yang justru menghalangi pertumbuhan ekonomi.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Turkey (Country), *op.cit.*

<sup>32</sup> *Collier's Encyclopedia*, Op Cit., hal. 529.

Pada awal tahun 1980-an pertumbuhan ekonomi Turki menunjukkan performa yang mengagumkan. Namun kemudian mengalami pertumbuhan yang tidak menentu. Sejak tahun 1988 pertumbuhan menanjak, hingga 9,2 % pada tahun 1991. Kebutuhan konsumen yang kuat dan peningkatan investasi publik membimbing jalan untuk mengalami pertumbuhan sebesar 5,9% pada tahun 1992. Tingginya inflasi yang kronis membuat Turki mengalami masalah ekonomi yang serius. Sehingga mata uang Turki, Lira, terdepresiasi secara tajam.

Menurut data dari CIA World Fact Book<sup>33</sup>, pada tahun 1992 GDP Turki sebesar 19 Miliar Dollar AS, perkapita 33670 Dollar AS dengan laju inflasi sebesar 70 %. Buruknya pertumbuhan ekonomi ini menyebabkan laju pengangguran meningkat sebesar 11,1 %.

Sektor pertanian menyumbangkan sekitar 18 % dari total GDP. Pertanian Turki menghasilkan tembakau, kapas, gandum, gerst, padi, minyak zaitun, gula bit, jeruk dan beberapa macam hasil produk ternak.

Kapas yang melimpah menjadikan industri tekstil berkembang dengan cepat, dan menjadikannya sebagai produk andalan. Selain tekstil, industri Turki menangani pengolahan makanan, sedikit bahan tambang (mineral), baja, konstruksi, kayu dan kertas. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, Turki mengimpor minyak, mesin, obat-obatan dan bahan kimia, pupuk dan perlengkapan transportasi. Partner dagang Turki adalah negara Jerman, Italia, Inggris, Arab Saudi, CIS (The Commonwealth of Independent States dan Amerika Serikat.

Selain dari ekspor, devisa negara Turki juga banyak didapat dari turis-turis mancanegara. Pada tahun 1995, lebih dari 7,7 Miliar turis mancanegara menghasilkan devisa sebesar 4.900 Miliar Dollar AS.

GDP per kapita Turki baru mencapai 1.797 Dollar AS dan diperkirakan baru akan mencapai angka 1.908 Dollar AS tahun 1996. Angka ini jauh lebih kecil

---

<sup>33</sup> CIA World Fact Book 1992, hal. 5, dalam [www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/tu.html](http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/tu.html) diakses pada 5 Mei 2003.

dibandingkan dengan GDP per kapita rata-rata negara Eropa lainnya yang sudah mencapai 15.000 Dollar AS.

Tingkat inflasi Turki tergolong tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara Eropa lainnya yang rata-rata hanya tiga persen. Tingkat inflasi Turki menurut Asia Week edisi 12 Januari 1996, sebesar 111 % tahun 1994, turun menjadi 91,3 % tahun 1995. Sedangkan tingkat inflasi akhir Januari 1996 sudah mencapai angka 83,8 %.<sup>34</sup>

#### **D. Pertahanan dan Keamanan**

Bidang keamanan menjadi perhatian utama Turki, karena meskipun Perang Dingin telah berakhir namun Turki tetap merasa tidak aman berkaitan dengan permasalahan dalam negeri (konflik etnik) dan persepsi ancaman dari luar negeri. Ancaman dari dalam negeri datang dari kelompok-kelompok Kurdi (*PKK/Partiye Karkeran Kurdistan*) dan kelompok-kelompok radikal Islam. Sedangkan ancaman dari luar negeri berasal dari negara-negara tetangga Turki, karena Turki dikelilingi oleh negara-negara yang rawan dengan konflik. Masalah separatist Kurdi atau teroris PKK berkaitan erat dengan negara Irak, Iran dan Syria yang berbatasan langsung dengan Turki dan dicurigai membantu melindungi tokoh PKK. Sementara itu di Eropa Barat terdapat sekitar 1,8 juta warga negara Turki dan sebagian dari mereka adalah Kurdi yang mendukung PKK. Juga usaha-usaha dari beberapa negara mempersenjatai dirinya dengan senjata pemusnah (termasuk nuklir), terorisme internasional yang berkaitan pula dengan lalu lintas narkotik dan fundamentalisme agama.

Untuk mempertahankan eksistensi negaranya maka Turki meningkatkan teknologi perang dengan mengalokasikan anggaran belanja negaranya sebesar 425 Dollar AS atau sekitar 11,5 % dari seluruh anggaran belanja negara untuk tahun anggaran 1995 kepada Departemen Pertahanan Nasional. Selain itu Turki juga banyak mendapatkan bantuan senjata dari Amerika Serikat karena Turki merupakan

---

<sup>34</sup> Kompas, 9 Februari 1996.

sekutu Amerika Serikat dan anggota NATO. Militer Turki juga bersahabat erat dengan Amerika Serikat karena militer Turki merupakan penjaga sekulerisasi Turki dan pro Barat.

#### **E. Sistem Pemerintahan Turki**

Pada dasarnya, kebijakan luar negeri suatu negara adalah perpanjangan tangan dari kebijakan atau politik dalam negeri negara tersebut. Hal ini dapat dilihat dari kenyataan bahwa keduanya sama-sama mengabdikan pada kepentingan bangsa dan negaranya, dan hanya berbeda dari segi ukuran, serta dimana kepentingan yang dimaksud akan dicapai. Karenanya, untuk memahami kebijakan luar negeri suatu negara, maka perlu memahami sistem politik negara yang bersangkutan beserta mekanismenya yang melahirkan kebijakan tertentu, termasuk kebijakan luar negeri

Turki modern adalah sebuah negara yang berpemerintahan republik, demokratis, dan menganut sistem multi partai. Pada tahun 1876, Kekhalifahan Turki menjadi negara muslim pertama yang mengadopsi hukum tertulis dan parlemen. Setelah revolusi Turki Muda pada tahun 1908, kekuasaan Khalifah dikurangi. Tetapi hanya di bawah kepemimpinan Atatürk kedaulatan rakyat dinyatakan dan diakui dengan diproklamasikannya kemerdekaan Turki pada 29 Oktober 1923 dan pada 3 Maret 1924, kekhalifahan akhirnya dihapuskan.

Tanggal 20 April 1924, Majelis Agung Nasional (MAN) mengeluarkan konstitusi baru yang menyatakan bahwa Turki adalah negara republik, beribukota Ankara dan Islam sebagai agama resmi negara. Setelah kudeta militer pada tahun 1960, dibentuk sebuah konstitusi baru terutama untuk mencegah berulangnya pemerintahan otoritarian oleh mayoritas anggota parlemen terpilih. Konstitusi baru itu mengatur tentang Senat dan majelis yang keanggotaannya berdasar pada perwakilan proporsional dimana sebelumnya hanya ada satu kamar, pengadilan konstitusional untuk mengawasi legislasi, hak asasi manusia dan menguatkan esensi reformasi sekuler Atatürk. Akhirnya pada 9 Juli 1961, setelah diadakan referendum nasional, konstitusi ini resmi berlaku.

Tetapi pada tahun 1980, setelah kekacauan ekonomi dan kekerasan politik, militer memberlakukan hukum darurat. Sebuah Konstitusi baru diratifikasi melalui referendum umum pada November 1982 dan konstitusi 1982 merubah beberapa aturan sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan di Turki menurut konstitusi 1982<sup>35</sup>, terbagi atas pemerintahan nasional dan pemerintahan lokal. Pemerintahan nasional terdiri atas badan legislatif, eksekutif dan yudikatif.

Majelis Agung Nasional (MAN) merupakan badan legislatif yang menjalankan fungsinya atas nama bangsa. MAN diberi kekuasaan untuk melaksanakan kekuasaan legislatif pertama kali pada 23 April 1920 di Ankara oleh Atatürk, dan pada awalnya merupakan organisasi dari gerakan kemerdekaan Turki. Berdasar Konstitusi 1982, MAN hanya terdiri dari satu kamar. Tugasnya adalah menetapkan, merubah dan menghapuskan suatu hukum, mengawasi tindakan Dewan Menteri, menetapkan Anggaran Belanja Negara, menyatakan perang, meratifikasi perjanjian internasional, menyatakan amnesti dan meratifikasi eksekusi bagi hukuman mati.

Menurut Konstitusi 1982, kekuasaan eksekutif berada ditangan Presiden dan Dewan Menteri.

Presiden merupakan kepala negara yang dipilih oleh MAN untuk masa jabatan tujuh tahun, diantara anggota MAN atau dari warga negara berusia lebih dari 40 tahun dan memenuhi syarat untuk dipilih oleh MAN. Tugas dan wewenang presiden dalam kaitannya dengan kekuasaan legislatif: mempublikasikan undang-undang, mengembalikan suatu undang-undang kepada MAN untuk dipertimbangkan kembali, memutuskan pemilihan bagi parlemen, mengeluarkan undang-undang yang berkaitan dengan perubahan konstitusi melalui referendum. Sedang tugas dan wewenang presiden dalam kaitannya dengan kekuasaan eksekutif adalah menunjuk

---

<sup>35</sup> *The 1982 Constitution*, dalam *Constitution of the Republic of Turkey*, diambil dari Republic of Turkey Ministry of Foreign Affairs, hal. 6 ([www.mfa.gov.tr/groupc/ca/cag/1142.htm](http://www.mfa.gov.tr/groupc/ca/cag/1142.htm), diakses pada 5 Januari 2003).

perdana menteri dan menerima pengundurannya, menunjuk duta besar dan menerima duta besar dari negara lain, meratifikasi dan mempublikasikan perjanjian internasional sebagai panglima tertinggi Angkatan Bersenjata, berdasar rekomendasi perdana menteri menunjuk atau mengganti menteri. Tugas dan wewenang presiden dalam kaitannya dengan kekuasaan yudikatif adalah menunjuk anggota pengadilan konstitusional serta menunjuk anggota majelis negara, kepala dan wakil pengadilan militer dan Mahkamah Agung.

Dewan Menteri terdiri atas perdana Menteri dan Menteri. Perdana Menteri dipilih oleh presiden dan menteri dipilih oleh Perdana Menteri dan semua ditunjuk oleh Presiden. Dewan Menteri bertanggung jawab kepada Legislatif. Perdana menteri bertanggung jawab untuk menjamin bahwa fungsi dewan seimbang dan ada koordinasi antar menteri. Perdana Menteri menjamin bahwa tiap-tiap menteri menjalankan fungsinya sesuai dengan konstitusi dan hukum, dan berkewajiban melakukan koreksi. Menteri bertanggung jawab kepada Perdana Menteri. Selain bertanggung jawab secara kolektif, Dewan Menteri juga bertanggung jawab secara individu. Tugas utama Dewan Menteri adalah menyusun dan menetapkan kebijakan dalam negeri dan luar negeri.

Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh pengadilan independen yang berfungsi atas nama bangsa Turki. Tidak ada organ, badan, wewenang atau individu yang berusaha mengintimidasi, memerintah atau membuat saran dan rekomendasi serta catatan terhadap hakim berkaitan dengan tugas mereka. Faktor terpenting yang menjamin kemerdekaan yudikatif adalah adanya jaminan bagi hakim dan jaksa oleh konstitusi. Hakim juga bertugas mengawasi pemilu.

Sedangkan pemerintahan lokal adalah sistem pemerintahan yang didirikan untuk mempertemukan kebutuhan-kebutuhan utama penduduk yang berada di wilayah tertentu, oleh badan-badan yang dipilih oleh penduduk di wilayah tersebut. Untuk memperlancar pemerintahan di daerah, Turki membagi wilayahnya menjadi 74 *if* (*vilayets* atau propinsi) yang dipimpin oleh *vali* (gubernur). Pemerintahan lokal diberi wewenang oleh pemerintah pusat untuk memperkenalkan aturan-aturan dan

kewajiban finansial dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan wilayahnya. Propinsi dibagi dalam distrik-distrik yang disebut *ilce*, yang dapat memungut pajak dan menerapkan beberapa kekuasaan lokal lainnya. Distrik dibagi dalam sub distrik (*bucak*).

#### F. Dominasi Militer

Sebagai penjaga sekulerisme dan demokrasi, militer Turki menduduki posisi penting dalam kehidupan sosial politik. Bahkan pada prakteknya, militerlah pemegang kekuasaan tertinggi di Turki. Mereka mewarisi dua tradisi politik yang berlawanan. Pertama, adanya tradisi mendalam untuk mengintervensi politik yang secara luas menciptakan persepsi militer sebagai penjaga negara dan ketidakpercayaan kepada para politisi. Menganggap perannya sebagai penjaga, yang dilegitimasi oleh peran elit militer dalam membentuk republik dan ideologi keamanan, telah meningkatkan kecenderungan militer untuk melakukan intervensi dan bersikap otoritarian. Kedua, adanya warisan dari kelompok militer sebagai modernisator. Sebagai kekuatan modernisasi sejak abad 19, khususnya setelah reformasi kemalis, mereka berusaha mengikuti pemerintahan yang berpola Barat yang akan mengarah pada demokrasi. Tradisi lama yang dianggap menyebabkan instabilitas politik dan fragmentasi, membahayakan keamanan negara, berlawanan dengan aspirasi militer untuk membentuk pemerintahan yang bercorak Barat.<sup>36</sup> Tradisi itulah yang membuat militer melakukan tiga kali intervensi dalam kehidupan social politik di Turki sejak didirikannya Republik Turki pada tahun 1923.

Pada tahun 1960, militer melakukan kudeta terhadap pemerintahan Partai Demokrat karena pengaruh partai yang didukung gerakan Islam ini disadari mulai menguat dikalangan masyarakat, disamping berkembangnya kebijakan Partai Demokrat sendiri yang nampak bergerak pada arah partai tunggal dan negara yang dictatorial dan kekuasaan partai tunggal. Konstitusi juga berusaha menciptakan iklim

---

<sup>36</sup> Ihsan D. Dagi, *Democratic Transition in Turkey, 1980-1983: The Impact of European Diplomacy*, dalam Sylvia Kedourie, *Turkey Identity, Democracy and Politics*, Frank Cass, London, 1996, hal. 124.

demokrasi dengan menerima pengakuan atas pandangan-pandangan yang bertentangan. Tetapi iklim demokrasi kembali tersandung oleh kudeta militer pada 12 Maret 1970. Militer yang mengaku sebagai penjaga demokrasi membubarkan beberapa partai yang dianggap berbeda pandangan mereka.

Pada tahun 1970-an, ketika birokrasi negara dan intelektual terbagi dalam ideology masing-masing, yang menyebabkan fragmentasi politik, militer memandang diri mereka sebagai satu-satunya elit negara yang padu, prajurit sejati bahkan pemilik negara. Ketidakmampuan pemerintah untuk mengatasi disintegrasi politik menjadi salah satu alasan pengambilalihan kekuasaan pada tahun 1980. rezim militer berusaha merubah sikap politik penduduk dan social di masa mendatang, serta polarisasi yang selalu menandai pra kudeta di Turki. Kudeta tahun 1980 berusaha untuk melindungi integritas bangsa, memperbarui kesatuan nasional dan kebersamaan, mencegah kemungkinan perang sipil, membangun kembali otoritas negara dan untuk menghapuskan semua hukum yang mencegah berfungsinya aturan demokrasi secara normal. Jenderal Kenan Everent, pemimpin kudeta yang kemudian menjadi Ketua Dewan Keamanan Nasional (DKN), menambahkan bahwa tujuan kudeta adalah untuk membentuk pemerintahan yang liberal, demokratis, sekuler yang berbasis pada aturan hukum, yang akan menghormati hak asasi dan kebebasan.<sup>37</sup>

Berdasar komitmen militer terhadap demokrasi, maka pasca kudeta 1980, diijinkan lahirnya berbagai partai politik dari bermacam aliran. Salah satunya adalah partai beraliran Islam, Partai Refah yang didirikan tahun 1983. Tetapi sejak awal kelompok militer sudah memandang dengan khawatir keberadaan Refah, yang pengaruhnya mulai menguat di kalangan masyarakat. Meski pada akhirnya Refah berhasil memegang kekuasaan pada pertengahan 1996, tetapi setelah berjanji kepada militer untuk tidak menentang sekulerisme dan sikap pro Barat Turki.

---

<sup>37</sup> *Ibid*, hal. 125.

### G. Perkembangan Politik Turki

Menurut ukuran Eropa, perkembangan partai politik di Turki baru dimulai pada akhir abad 19. Kemunculan partai pada periode ini dipelopori oleh para lulusan sekolah modern, pejabat militer dan pegawai sipil. Gerakan politik ini bertujuan untuk mencegah lebih jauh kemunduran Kekhalifahan Utsmani dan untuk memperkenalkan prinsip-prinsip nasionalisme, kebebasan dan persamaan seperti yang telah muncul di Eropa.

Kelompok intelektual dan liberal tersebut mendirikan gerakan yang dikenal sebagai Turki Muda, yang menghendaki pembatasan dalam konstitusi mengenai kekuasaan kelas penguasa dan birokrasi, dan meminta parlemen untuk memperkuat hak-hak penduduk. Periode awal era Turki Muda (1908-1918) merupakan periode yang paling demokratis dalam sejarah Utsmani. Setelah konstitusi dan parlemen diperbaharui, partai-partai dibentuk untuk memperebutkan kepemimpinan.

Partai yang terkuat adalah Partai Persatuan dan Kemajuan yang dibentuk dan didukung oleh Turki Muda. Tetapi perang Balkan pertama menyebabkan pemberontakan dalam tubuh partai, dan akhirnya mengakhiri keberadaannya.

Kemenangan Turki atas Yunani yang memunculkan Atatürk sebagai seorang penggerak yang memberikan dorongan bagi munculnya gerakan nasionalisme Turki, diberikannya kepercayaan yang besar dari penduduk kepada Atatürk dan pengikutnya. Untuk memperkuat kekuasaannya, Atatürk mendirikan Partai Rakyat (*Halk Fırkası*, yang kemudian berubah menjadi Partai Republik Rakyat; *Cumhuriyet Halk Partisi/CHP*), dan secara resmi didirikan pada 9 September 1923. Partai ini dimaksudkan untuk mengabdikan pada semua generasi Turki dan merupakan manifestasi dari semangat tugas sejati untuk tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan pada masa sebelumnya. Partai Republik Rakyat menganut falsafah nasionalisme, jadi ia menuntut hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa Turki dan sebaliknya mengakui hak yang sama bagi bangsa Arab. Republik Rakyat merupakan

---

satu-satunya partai politik yang pada awalnya menampung heterogenitas pandangan yang begitu tinggi dan dijadikan sebagai kendaraan bagi rencana-rencana reformasi Ataturk.

Menurut Konstitusi 1924, presiden terpilih berhak membentuk kabinet. Dalam negara dengan sistem satu partai seperti Turki, berarti jika Ataturk dapat mengontrol partai ia juga dapat mengontrol majelis dan kekuasaannya sebagai presiden menjadi tidak terbatas. Tetapi bukan berarti tidak ada yang menentang Ataturk. Banyak orang Turki yang merasa terguncang dengan penghapusan kekhalifahan dan pengikisan lembaga-lembaga Islam. Kebanyakan dari mereka, meskipun benar-benar berpikiran Barat melihat bahwa kekuasaan terlalu banyak di tangan Ataturk. Akhirnya mereka keluar dari Partai Republik Rakyat dan membentuk Partai Republik Progresif pada akhir 1924, yang menekankan praktek demokrasi, pemisahan kekuasaan dan kebebasan sipil.

Oposisi lain datang dari Suku Kurdi pada Februari 1925, yang dipimpin oleh Syeikh said, yang tidak hanya didorong oleh Nasionalisme Kurdi tetapi lebih karena sentimen Islam. Untuk mengatasi hal ini, Majelis mengeluarkan undang-undang untuk pemeliharaan aturan yang memberi perkecualian kekuasaan pada pemerintah. Akhirnya Pengadilan independen menghukum Syeikh Said dan lebih dari 40 pemberontak lain digantung. Dengan menggunakan kekuatan baru tersebut, pemerintah juga menutup sejumlah surat kabar Istanbul, menangkap jurnalis dan menekan Partai Republik Progresif. Dominasi satu partai dikuatkan kembali.

Cara yang digunakan Ataturk untuk memaksa Turki meniru Barat merupakan tindakan yang gradual dan tidak mengenal kompromi, dan hal ini dianggap bertentangan dengan prinsip demokrasi yang didengungkan. Karenanya, muncul kritik yang menuduh Ataturk gila kekuasaan, dan menuntut pembatasan kekuasaannya. Pada tahun 1926, Ataturk memutuskan untuk memberantas oposisi itu. Tetapi kemudian ditemukan sekelompok orang yang berusaha membunuh Ataturk serta para pendukung Sultan. Akibatnya 18 orang ditangkap dan dijatuhi hukuman mati.

Setelah kejadian-kejadian tersebut, Ataturk dan partainya tetap menjadi penguasa yang tidak diragukan lagi di Republik Turki. Pemerintahan tetap merupakan sistem satu partai, di mana Sekjen Partai bisa merangkap jabatan sebagai Menteri Dalam Negeri. Proses demokrasi, diskusi bebas dan mayoritas suara lebih tampak di dalam Partai Republik Rakyat daripada ketika anggotanya duduk di dalam MAN. Keputusan politik yang mendasar, termasuk pembuatan undang-undang, biasanya lebih dahulu di bahas dalam pertemuan partai, baru disodorkan ke Majelis di mana anggota-anggota partai yang sama mengesahkannya menjadi undang-undang.

Atas ijin Ataturk, pada tahun 1930 didirikan partai oposisi kecil, Partai Republik Independen. Ataturk mengharapkan Partai ini menjadi oposisi yang moderat dan kritiknya bersifat membangun. Namun akhirnya dibubarkan karena dianggap mengecewakan. Sistem satu partai ini bertahan lebih dari dua dekade. Pada akhir Perang Dunia II, setelah Turki masuk PBB tahun 1945, sistem satu partai mulai ditinggalkan. Sistem satu partai resmi dihapuskan, dan diganti dengan sistem multi partai pada Januari 1947 setelah dibentuknya Partai Demokrat.<sup>38</sup>

Dari tahun 1980, politik Turki didominasi oleh Partai Republik Rakyat dan Partai Keadilan, setelah kedua partai tersebut memerintah pada periode sebelumnya. Partai Republik Rakyat memerintah Turki dari tahun 1923-1950, dan memperjuangkan sekulerisme secara kuat. Partai Keadilan, sebagian besar anggotanya terdiri atas mantan anggota Partai Demokrat (*Demokrat Partisi*, DP) memerintah Turki sejak tahun 1950-1960. Kedua partai tersebut benar-benar seimbang kekuatannya, dan sebagian besar pemerintahan merupakan koalisi yang melibatkan satu atau lebih partai yang lebih kecil.

Pada masa pemerintahan Partai Demokrat, di bawah pimpinan Presiden Celal Bayar dan Perdana Menteri Adnan Menderes, aktifitas politik dan kritik sangat dibatasi; surat kabar disensor atau ditutup. Kekuasaan ternyata membuat Partai Demokrat bahkan lebih otokratik dibanding Partai Republik Rakyat. Terbatasnya

oposisi politik dan mulai bergerak Partai Demokrat ke arah partai tunggal, negara yang bercorak diktatorial, membuat militer mengambil alih pemerintahan dan mengakhiri keberadaan Partai Demokrat. Setelah itu kebebasan pers diperbarui, aktifitas politik dimulai lagi pada Januari 1961. Adnan Menderes serta Menteri Luar Negeri dan Menteri Keuangan dieksekusi.

Sebelumnya, pada tahun 1948, muncul Partai Nasional yang memiliki program-program keagamaan yang lebih jelas, yang menganjurkan kebangkitan Islam dan pengenduran yang substansial, bahkan pengurangan aspek sekuleris dalam kebijakan pemerintah Turki. Partai Nasional merupakan fenomena penting, karena merupakan manifestasi pertama dari partai politik fundamentalis dalam sistem politik Turki. Partai ini akhirnya dibubarkan pada tahun 1954.

Sejak tahun 1965 Turki dipimpin oleh pemerintahan koalisi yang didominasi oleh Partai Keadilan. Meskipun dianggap sebagai jelmaan Partai Demokrat, Partai Keadilan, menyatakan diri sebagai pendukung tujuan revolusi 1960. Menjelang Oktober 1965, Partai Keadilan akhirnya mampu membentuk pemerintahan sendiri dengan Suleiman Demirel sebagai presiden.<sup>39</sup>

Setelah Partai Demokrat dibubarkan, sebagian pendukungnya bergabung dengan Partai Keadilan, sementara kelompok gerakan Islam mendirikan Partai Keteraturan Nasional pada 7 Januari 1970. Tujuan partai ini adalah, pertama: mengislamkan kehidupan rakyat Turki dan menciptakan pasar bersama di antara negara-negara Muslim, kedua: ingin melepaskan Turki dari ketergantungan terhadap Eropa dan akan memberlakukan Syariah Islam, hal tabu bagi pemerintahan Turki yang menganut Undang-undang sekuler.<sup>40</sup>

Selama tahun 1970-an, mulai muncul kegiatan politik yang diorganisasikan oleh partai-partai minoritas yang menganjurkan pembentukan negara Islam. Sehingga

---

<sup>38</sup> George Lenczowski, *Timur Tengah di Tengah Kancan Dunia*, Sinar Baru Algesindo, Bandung, 1992, hal. 80-85.

<sup>39</sup> John Obert Voll, *Politik Islam, Kelangsungan dan Perubahan*, Titian Ilahi Pers, Yogyakarta, 1997, hal. 403-404.

<sup>40</sup> Mahadi, *Dinamika Partai Islam di Turki*, dalam *Ishlah*, No.62/Th. IV, 1996, hal 60-61.

partai utama, Republik Rakyat dan Partai Keadilan harus bekerja sama dengan aktifitas-aktifitas partai Islam untuk membentuk pemerintahan dan menguasai mayoritas di parlemen. Setelah pemilu 1973, Partai Republik Rakyat dibawah pimpinan Bulent Ecevit, membentuk pemerintahan koalisi dengan Partai keselamatan Nasional (NSP) yang memenangkan 12 persen suara. Masa itu digambarkan sebagai pemerintahan Turki yang radikal karena merupakan pertama kali partai Islam memperoleh kekuasaan semenjak revolusi sekuler tahun 1924. Bahkan Necmettin Erbakan, pemimpin Partai Keselamatan Nasional, diangkat menjadi Deputi Perdana menteri di bidang Ekonomi. Tahun 1975 dan 1977, ketika Partai Keadilan berada di bawah pimpinan Sulciman Demirel, juga membentuk pemerintahan yang melibatkan Partai keselamatan Nasional. Dengan demikian, pada pertengahan dekade ini partai Islam dan anti sekuler mempunyai pengaruh politik yang substansial.

Rezim militer yang memegang pemerintahan setelah kudeta pada tahun 1980, membubarkan semua partai politik dan memenjarakan pemimpin-pemimpinnya dan melarang beberapa politisi untuk melakukan semua kegiatan politik. Setelah itu mulai muncul kelompok-kelompok ekstrim yang berpengaruh penting, bukan karena partisipasi mereka dalam proses konstitusional, tetapi karena tindakan mereka di luar pemerintahan. Misalnya, Partai Tindakan Nasional (*National Action Party, NAP*), yang dipimpin Alparslan Turkes, yang telah menciptakan kelompok-kelompok militan yang terlibat dalam demonstrasi-demonstrasi dan sering terlibat dalam konflik dengan kelompok lain dan para penguasa.

Dalam persiapan menjelang pemilu 1983 untuk memilih Majelis Nasional, beberapa partai baru diijinkan untuk dibentuk. Diantaranya muncul Partai Refah yang diproklamasikan pada 19 Juli 1983. Tetapi pemerintah militer tetap mempertahankan kontrol terhadap proses pembentukannya dengan melarang partai memilih pemimpin atau calon anggota parlemen yang tidak dikehendaki oleh militer. Dua partai penting, Partai Sosial Demokrat (DSP), dan Partai Jalan Kebenaran (*Dogru Yol Partisi, DYP*) dapat dikatakan sebagai kebangkitan dari Partai Republik Rakyat dan Partai Keadilan. Tiga partai yang diijinkan untuk mengikuti pemilu 1983 adalah Partai Demokrasi

Nasional (NDP), yang didukung oleh rezim militer, Partai Populis, dan Partai Konservatif; Partai Tanah Air (*Anavatan Partisi/ANAP*). Pada pemilihan itu, Partai demokrasi Nasional menduduki urutan ketiga dan Partai Tanah Air memenangkan suara mayoritas bagi kursi majelis. Pemimpinnya, Turgut Ozal, yang menjadi Deputi Perdana Menteri selama 21 bulan pemerintahan militer, menjadi Perdana Menteri pada tahun 1983.

Pada pemilu 1987, Partai Jalan Kebenaran yang dipimpin Suleiman Demirel dan Partai Sosial Demokrat diijinkan untuk berpartisipasi dalam pemilu. Pemilu ini dimenangkan oleh Partai Tanah Air. Sedangkan Pada pemilu Oktober 1991 Partai Tanah Air kehilangan mayoritasnya di parlemen, dan tidak ada partai yang menjadi mayoritas. Akhirnya pada November 1991, Partai Jalan Kebenaran dan Partai Sosial Demokrat membentuk pemerintahan koalisi dengan Suleiman Demirel sebagai Perdana Menteri. Setelah meninggalnya Turgut Ozal pada 17 April 1993, Suleiman Demirel terpilih sebagai Presiden pada 16 Mei, dan Tansu Ciller dari Partai Jalan Kebenaran ditunjuk sebagai Perdana Menteri.<sup>41</sup>

Pada pemilu lokal tahun 1994, Partai Refah memenangkan suara di seluruh kota besar di Turki dan di 29 propinsi dan daerah pemilihan yang membuatnya mengungguli partai pemerintah yang dipimpin Ciller yang hanya menguasai 12 daerah. Puncak kemenangan Refah adalah pada pemilu 1995, ketika berhasil meraih 21,38 persen suara atau 158 dari 550 kursi di parlemen, dibandingkan dengan Partai Jalan Kebenaran yang memperoleh 135 dan Partai Tanah Air 132 kursi. Setelah gagal membentuk pemerintahan koalisi dengan partai sekuler pada kesempatan pertama, akhirnya Partai Refah berhasil naik ke tampuk kekuasaan pada bulan Juni 1996, setelah koalisi partai sekuler (Yilmaz-Ciller) gagal dalam menjalankan pemerintahannya.

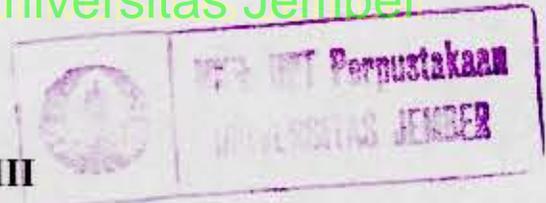
Dengan demikian, dalam melaksanakan kebijakan luar negerinya Turki dipengaruhi oleh dua kondisi diatas, yaitu letak geografisnya di kawasan Eropa, Asia

---

<sup>41</sup> Lauren S. Bahr, Bernard Johnston, *op.cit.*, hal. 528

Tengah dan Timur Tengah dan sistem/struktur politik yang pada awal perkembangannya dipengaruhi oleh ideologi Islam kemudian berubah menjadi negara sekuler dengan berorientasi ke Barat. Sehingga Turki berada dalam posisi yang dilematis antara dua unsur yang berbeda, dengan mayoritas 99 % penduduk Turki beragama Islam keinginannya untuk bekerja sama dengan negara-negara Islam dikawasannya yang mempunyai kesamaan bahasa dan historis terkadang bertentangan dengan kebijakan luar negeri Turki yang berorientasi ke Barat dengan menjadikan negara-negara Barat seperti Amerika Serikat dan Eropa sebagai “kiblat” bagi kebijakan politik luar negerinya.





### BAB III

## POLITIK LUAR NEGERI TURKI TERHADAP AMERIKA SERIKAT

### 3.1 Politik Luar Negeri Turki terhadap Amerika Serikat Sebelum Pemerintahan Erbakan

Secara umum, gambaran politik luar negeri Turki telah dibicarakan pada bab II. Salah satu faktor yang penting dalam pelaksanaan kebijakan luar negeri tersebut, meskipun tidak terlepas dari kondisi yang ada dalam sistem politik Turki, adalah terletak pada pemikiran, karakter, pandangan dan latar belakang perdana menterinya. Perubahan yang terjadi dalam pemerintahan Turki, yaitu dengan terjadinya pergantian kepala pemerintahan atau perdana menterinya akan mewarnai pola kebijakan luar negeri yang diambil Turki. Karakter, pandangan, pemikiran dan latar belakang dari seorang perdana menteri akan menentukan arah pelaksanaan kebijakan luar negeri di Turki. Apalagi perdana menteri itu berasal dari partai yang berbeda aliran dan saling beroposisi.

#### 3.1.1 Pada Masa Perang Dingin

Sejarah hubungan diplomatik Turki dengan Amerika Serikat sudah dirintis sejak awal abad XIX yang pada mulanya didominasi oleh aktivitas misionaris Amerika Serikat di Kesultanan Utsmani. Pada saat Perang Dunia Pertama berakhir, Turki belum benar-benar diperhitungkan sebagai daerah pengaruh bagi kepentingan nasional Amerika Serikat. Hubungan diplomatik yang intensif baru dimulai pada tahun 1927 dan sesudahnya terus ditingkatkan.

Tuntutan Uni Sovyet terhadap wilayah teritorial di selat Turki dan dua propinsi yang berbatasan dengan USSR mempererat hubungan kedua negara. Amerika Serikat menganggap Soviet sebagai kekuatan ekspansionis dan mengkhawatirkan kondisi geografis Turki yang strategis apalagi Turki merupakan

aset penting bagi pelaksanaan kebijakan luar negeri Amerika Serikat.<sup>1</sup> Untuk itu Turki mendapatkan program bantuan Doktrin Truman pada tahun 1947 dan Marshal Plan setahun kemudian.<sup>2</sup>

Keikutsertaan Turki pada Perang Korea dan komitmen yang kuat pada nilai-nilai demokrasi mendorong Amerika Serikat untuk mensponsori Turki menjadi anggota penuh NATO pada tahun 1952.<sup>3</sup>

Sepanjang Perang Dingin hubungan Turki dengan Amerika Serikat mengarah pada hubungan keamanan. Turki mendapat perlindungan dari Amerika Serikat, sementara itu Amerika mendapat sekutu yang setia dalam menjaga keamanan Eropa dan Timur Tengah. Sebagai negara yang mempunyai perbatasan darat terpanjang dengan Uni Sovyet, maka Turki dan Amerika Serikat saling membutuhkan. Apalagi Turki merupakan satu-satunya negara anggota NATO yang mayoritas penduduknya beragama Islam sehingga Turki menjadi istimewa. Sedangkan Amerika Serikat merupakan pemimpin aliansi Barat.

Namun kesetiaan dan kepatuhan Turki terhadap perannya sebagai pilar NATO bukan tanpa imbalan. Turki menyediakan pangkalan militernya untuk digunakan pasukan Amerika Serikat dan NATO untuk menghadapi ancaman Uni Soviet. Sementara itu Amerika memberikan bantuan ekonomi dan militer kepada Turki.

Dijinkannya penggunaan pangkalan militer Turki oleh Amerika Serikat dan NATO sering menimbulkan konflik di dalam negeri. Rakyat menginginkan pangkalan tersebut ditutup. Sedangkan para *decision makers* di Turki

---

<sup>1</sup> Kemal Kirisci, *Turkey and United States: Ambivalent Allies*, dalam *Middle East Review of International Affairs* Vol. 2, No. 4, 1998, hal 1 (<http://meria.idc.ac.il/journal/1998/issue4/kirisci.pdf>, diakses 12 September 2002)

<sup>2</sup> Doktrin Truman dan Marshal Plan merupakan penerapan dari *Containment Strategi* (strategi pembendungan) Amerika Serikat terhadap Turki untuk menyelamatkan krisis ekonomi di Turki, karena bisa memancing kehadiran komunis. Marshal Plan berupa bantuan ekonomi dan perlindungan militer yang diberikan Amerika Serikat agar Turki tetap dalam pax-Amerikana (Amerika Raya), dalam Sidik Jatmika, *AS Penghambat Demokrasi: Membongkar Politik Standar Ganda Amerika Serikat*, BIGRAF Publishing, Yogyakarta, 2000, hal. 194.

<sup>3</sup> Kemal Kirisci, *Turkey and the United States...*, *op.cit.*, hal. 1.

mempertimbangkan kebutuhan keamanan Turki yang besar terhadap Amerika Serikat. Namun mereka tidak menginginkan penggunaan pangkalan militer tersebut disalahgunakan oleh Amerika Serikat untuk ikut campur dalam setiap permasalahan Turki baik masalah dalam negeri maupun regional.

Hubungan kedua negara terkadang diikuti oleh rasa ketidakpercayaan dikalangan rakyat Turki terhadap maksud dan tujuan dari kebaikan Amerika Serikat mengingat beberapa peristiwa yang terjadi, yaitu: pertama, keputusan Amerika Serikat untuk memindahkan rudal Jupiter dari Turki setelah terjadinya peristiwa Cuban Missile Crisis di tahun 1962. Elit-elit pemerintahan Turki memandang hal tersebut sebagai sebuah bentuk persaingan dari dua kekuatan super power yang membuat keraguan yang semakin kuat mengenai komitmen Amerika Serikat untuk membantu permasalahan Turki di bidang militer. Kedua, di tahun 1964 Perdana Menteri Ismet Inonu, salah satu pendiri Republik Turki, menerima surat penghinaan dari Presiden Lyndon Johnson. Surat yang dikirim bersamaan dengan terjadinya krisis Cyprus berisi peringatan agar Turki tidak menggunakan senjata buatan Amerika Serikat untuk melawan Cyprus karena Amerika Serikat beranggapan akan dapat memancing keikutsertaan militer Uni Soviet dalam konflik tersebut, dan apabila hal tersebut terjadi maka Amerika Serikat tidak akan membantu Turki untuk mempertahankan diri. Ketiga, Amerika Serikat memberikan sanksi pemutusan suplai senjata setelah pasukan Turki berhasil menduduki sepertiga wilayah Cyprus.<sup>4</sup>

### 3.1.2 Pasca Perang Dingin

Keluarnya Amerika Serikat sebagai pemenang dalam Perang Dingin selama lebih dari empat dasawarsa, disusul pula oleh kemenangannya dalam menangani krisis Teluk, baik di arena diplomasi multilateral, maupun dalam perang selama 40

---

<sup>4</sup> Loc. cit.

hari (meskipun tidak tuntas), telah mengukuhkan kedudukannya sebagai satu-satunya negara “adidaya sejati”.<sup>5</sup>

Titik penting yang mempertemukan antara Amerika Serikat dan Turki setelah berakhirnya Perang Dingin adalah bahwasannya keduanya merupakan negara yang berasaskan demokrasi, sekuler, pro terhadap kekuatan Barat di kawasannya, dan ingin mencegah bangkitnya kembali kekuatan Sovyet. Amerika Serikat mempromosikan Turki sebagai model bagi negara-negara bekas Uni Soviet yang mayoritas penduduknya beretnis Turki dan beragama Islam agar mereka bergabung kedalam program kerjasama perdamaian (*Organization for Peace and Cooperation in Europe*) yang diprakarsai oleh NATO. Kerjasama ini dikritik sebagai sebuah bentuk pengkonsolidasian geopolitik yang baru di bekas lingkungan pengaruh Uni Soviet. Apalagi kedua negara juga ikut campur dalam konflik etnis yang terjadi di Georgia dan Chechnya dan juga konflik yang terjadi antara Armenia-Azerbaijan mengenai masalah Nagorno-Karabakh.<sup>6</sup>

Selain kerjasama dalam bidang militer dan keamanan, kedua negara juga melakukan kerjasama di bidang ekonomi dengan dibukanya jalur pipa minyak dan gas yang melalui Turki tanpa melewati Rusia untuk menghindari bangkitnya kekuatan komunis.

Amerika Serikat juga memberi dukungan terhadap Turki dalam organisasi ekonomi di kawasan Laut Hitam (*Black Sea Economic Cooperation*) yang merupakan rencana Turki untuk memperkuat stabilitas keamanan di kawasan tersebut. Tanpa mengurangi rasa hormatnya kepada Uni Eropa, Amerika Serikat secara aktif juga memberi dukungannya kepada Turki untuk menjadi anggota penuh Uni Eropa dengan menjamin ratifikasi perjanjian Custom Union antara Turki dengan Uni Eropa.

---

<sup>5</sup> A. Hasnan habib, *Dimensi Eksternal Timur Tengah Pasca Perang Teluk: Peranan Negara-negara Besar*, dalam Bantarto Bandoro, *Timur Tengah Pasca Perang Teluk Dimensi Internal dan Eksternal*. Cetakan Pertama, CSIS, Jakarta, 1991, hal. 32.

<sup>6</sup> Kemal Kirisci, *Turkey and the United States*...*op.cit.*, hal. 3.

Dukungan Amerika Serikat terhadap keanggotaan tersebut bertujuan untuk mendorong pembangunan ekonomi dan demokrasi di Turki, agar Turki menjadi negara yang stabil dilingkungan yang kritis. Selain itu Amerika Serikat juga berusaha untuk mempromosikan Turki sebagai pasar yang potensial bagi investasi Amerika Serikat.

Sehingga meskipun Perang Dingin telah berakhir, Amerika Serikat tetap memandang Turki sebagai negara yang strategis karena menghubungkan Amerika Serikat dengan berbagai isu penting di wilayah Eurasia (Eropa dan Asia). Bahkan Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Strobe Talbot memandang hubungan Amerika Serikat-Turki memiliki "*even more a hardheaded, geopolitical, strategic rationale in the post-Cold War period than... during the Cold War*".<sup>7</sup>

### 3.1.3 Pengaruh Perang Teluk dalam Hubungan Turki-Amerika Serikat

Dengan bergabung dalam aliansi Barat di Perang Teluk, Turki terjebak dalam berbagai masalah tabu yang berkepanjangan. Turki melibatkan diri dalam keriuhan Timur Tengah, padahal semenjak konflik dengan Syria pada tahun 1957, Turki menghindari kehidupan politik di Timur Tengah sampai tahun 1990. Masalah-masalah tabu tersebut adalah: diperbolehkannya wilayah Turki sebagai daerah operasi bagi negara-negara anggota NATO dan menyediakan diri sebagai media bagi pelaksanaan kebijakan luar negeri Amerika Serikat untuk pertama kalinya semenjak intervensi Amerika Serikat di Lebanon tahun 1958. Turki juga mengalami kerugian dalam bidang ekonomi akibat embargo ekonomi terhadap Irak, dimana Irak merupakan salah satu partner dagang yang penting bagi Turki.<sup>8</sup>

Dukungan Turki secara penuh terhadap usaha Amerika Serikat untuk mengatasi permasalahan Kuwait dan dibangunnya hubungan yang erat dengan Israel,

---

<sup>7</sup> Alan Makovsky, *The New Activism...*, *op.cit.*, hal. 10.

<sup>8</sup> *Ibid*, hal. 1.

telah merubah secara tajam kebijakan luar negeri yang selama ini dijalankan Turki, menjauh dari konflik antara Arab-Israel, krisis minyak dan permasalahan Syria.

Perubahan kebijakan luar negeri tersebut juga dipicu dengan adanya ancaman Presiden Irak Saddam Hussein terhadap Turki maka pemerintah Turki memberikan dukungannya terhadap Amerika Serikat. Komitmen Turki sebagai anggota NATO dan sekutu terdekat Amerika Serikat juga mengharuskan Turki untuk berpartisipasi aktif, apalagi sikap anggota-anggota NATO lainnya yang berusaha mensuplai Turki dengan persenjataan canggih seperti "patriot-missile" yang dipasok di perbatasan dan di Pangkalan Udara Incirlik dan Batman.<sup>9</sup> Pangkalan Incirlik terletak 700 km dari wilayah Irak dan posisinya sangat strategis untuk menyerang Irak. Hingga akhirnya Irak diserang secara besar-besaran oleh tentara sekutu yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan berhasil dipukul mundur pada tahun 1991.<sup>10</sup>

Keterlibatan Turki dalam Perang Teluk ini mengundang reaksi keras baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Sebagian besar rakyat Turki menentanginya, begitu juga dengan partai-partai oposisi di Turki. Negara-negara di kawasan; Lybia, Aljazair, Iran, Maroko dan Yordania memberikan reaksi keras dan meminta Turki untuk menutup pangkalan udaranya yang digunakan Amerika Serikat untuk menyerang Irak.

Selain itu Turki juga mengalami kerugian dalam bidang ekonomi akibat embargo yang diberlakukan PBB dengan menutup saluran ekspor minyak Irak yang melalui Turki ke pelabuhan Mediterania, melarang ekspor segala macam barang ke Irak kecuali makanan dan obat-obatan, dan membekukan semua aset Irak yang ada di Turki. Padahal Irak merupakan salah satu partner dagang yang penting bagi Turki dan pemasok utama minyak bumi. Sehingga pada saat terjadinya embargo Turki diperkirakan menderita kerugian sebesar 8 Milyar Dollar AS.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Laporan Tahunan Periode 1990/1991, *op.cit.*, hal. 14.

<sup>10</sup> Riza Sihbudi, et al, Profil Negara-negara Timur Tengah, Cetakan Pertama, PT Dunia Pustaka Jaya, Jakarta, 1995, hal. 71.

<sup>11</sup> Laporan Tahunan KBRI Periode 1990/1991, *op.cit.*, hal. 14.

Berakhirnya Perang Teluk yang ditandai dengan penarikan mundur tentara Irak dari Kuwait telah memberikan dampak positif terhadap Turki, yaitu naiknya kredibilitas Turki di dunia internasional, khususnya di mata negara-negara Barat dan Amerika Serikat. Hubungan Turki dengan negara-negara Timur Tengah yang tidak menyukai Saddam Hussein pun semakin membaik.

Perang Teluk secara fisik telah berakhir pada tanggal 27 Februari 1991. Meskipun demikian kawasan Timur Tengah secara keseluruhan masih diliputi oleh ketidakpastian. Berbagai usaha untuk mengatasi akibat Perang Teluk masih terus dilakukan oleh negara-negara di kawasan maupun oleh negara-negara yang mempunyai kepentingan di kawasan tersebut, terutama Amerika Serikat.<sup>12</sup>

Presiden Amerika Serikat, George Bush, beberapa kali menyatakan penghargaannya kepada Presiden Turgut Ozal atas partisipasi Turki dalam Perang Teluk. Turki dianggap sebagai sekutu NATO yang terpercaya dan dinilai sebagai mediator bagi hubungan Amerika Serikat dan NATO dengan negara-negara di Timur Tengah pada masa mendatang. Sebaliknya negara-negara Timur-Tengah pun berusaha memanfaatkan Turki sebagai partner yang terpercaya dalam hubungannya dengan negara-negara Barat, mengingat mayoritas penduduk Turki beragama Islam dan mempunyai hubungan secara historis.

Turki melanjutkan kerjasama dengan negara-negara Timur Tengah, yaitu dengan Israel dan meningkatkan hubungan perdagangan dengan Mesir, Yordania dan negara-negara Afrika Utara.<sup>13</sup>

Hubungan Turki dengan Israel merupakan suatu usaha untuk membangun *counter-alliances* dalam menghadapi Iran, Syria, Yunani dan Armenia yang membahayakan Turki sendiri. Apalagi hubungan militer antara Turki dengan Israel banyak menimbulkan perdebatan di dalam negeri.

---

<sup>12</sup> Bantarto Bandoro, *Timur Tengah Pasca Perang Teluk*..., *op.cit.*, hal. 2.

<sup>13</sup> Kemal Kirisci, *Turkey and the United States*..., *op.cit.*, hal. 5.

Turki juga mendukung berlangsungnya *peace process* di Timur Tengah untuk mendapatkan jaminan terhadap semakin meningkatnya berbagai radikalisme yang membahayakan Turki. Kepentingan Amerika Serikat juga nampak pada usaha Turki untuk memperkuat hubungannya dengan Yordania dan negara-negara Arab Moderat lainnya.

Kunjungan Presiden Turgut Ozal ke Amerika Serikat pada tanggal 22 Maret 1991<sup>14</sup> terlihat sangat penting bagi hubungan kedua negara, karena berkaitan erat dengan *concrete gains* yang dapat diperoleh Turki dari Amerika Serikat sebagai timbal balik atas dukungan dan keterlibatan Turki dalam Perang Teluk. Turki menginginkan kerjasama dalam bidang perdagangan ditingkatkan dan dikendorkannya proteksi Amerika Serikat terhadap produk Turki.

Presiden Ozal juga berusaha menekan Amerika Serikat dengan adanya restrukturisasi di Kuwait agar para pengusaha dan kontraktor-kontraktor di Turki dapat mengambil bagian dari tender-tender yang sebagian besar di kuasai oleh kontraktor-kontraktor Amerika Serikat dan Inggris. Ozal juga meminta peningkatan bantuan militer dan ekonomi serta dukungan Amerika Serikat atas keinginan Turki untuk menjadi anggota penuh MEE (Masyarakat Ekonomi Eropa).

Turki berpartisipasi aktif dalam pasukan perdamaian dan pengawas operasi kemanusiaan PBB dan NATO, juga pada OPC ( *Operation Provide Comfort* ) yang diluncurkan pada bulan April 1991.

Partisipasi Turki bersama PBB dalam berbagai operasi pasukan perdamaian dan aksi-aksi kemanusiaan di Somalia, Bosnia dan Kosovo merupakan suatu kesempatan bagi Amerika Serikat untuk mempengaruhi masyarakat muslim di negara-negara tersebut serta negara-negara Islam lainnya bahwasannya Amerika Serikat berada di *line* yang sama dengan mereka. Bagi Turki kesempatan tersebut digunakan untuk mendapatkan simpati dari kaum muslim Bosnia di kawasan Balkan.

---

<sup>14</sup> Laporan Tahunan Periode 1990/1991, *op.cit.*, hal. 17.

OPC merupakan suatu *joint effort* (operasi militer) antara Turki, Amerika Serikat, Inggris dan Perancis untuk melindungi Kurdi di wilayah utara Irak dari ancaman tentara Saddam Hussein dengan menggunakan basis Angkatan Udara Turki di Incirlik.

### 3.1.4 Masalah Pelanggaran HAM terhadap Suku Kurdi

Berakhirnya Perang Dingin telah merubah strategi militer Amerika Serikat secara global dengan melakukan pengurangan bantuan militer terhadap negara-negara sekutu Amerika Serikat, termasuk Turki. Pemerintah Amerika Serikat menginginkan bantuan militer ke Turki yang selama ini berbentuk *grant* diganti menjadi *concessional credit*. Menyesuaikan dengan kondisi tersebut Turki meminta kepada Amerika Serikat agar kerjasama dalam bidang ekonomi lebih ditingkatkan mengingat kerjasama kedua negara dilandasi oleh persetujuan DECA ( *Defense and Economic Cooperation Agreement* ).<sup>15</sup>

Meningkatnya eskalasi pelanggaran HAM di Turki sebagai hasil dari konflik militer Turki dengan pemberontak Kurdi antara tahun 1992 dan 1996 juga mendorong kongres dan publik Amerika Serikat agar pemerintahannya meninjau kembali kebijakan luar negerinya terhadap Turki. Kemudian Amerika Serikat mengurangi subsidi perseniataannya setelah adanya laporan mengenai penggunaan senjata buatan Amerika Serikat dalam menghadapi konflik dengan suku Kurdi.

Akibatnya, 10 persen dari bantuan militer Amerika Serikat yang ada ditunda sampai adanya perbaikan masalah HAM.<sup>16</sup> Ditambah lobi yang kuat dalam kongres dari kelompok pengawas HAM dan senjata diikuti dengan lobi dari etnis anti Turki mengenai masalah Cyprus dan Armenia memaksa lembaga eksekutif untuk menghentikan bantuannya kepada Turki.

---

<sup>15</sup> Laporan Tahunan Periode 1993/1994, *op.cit.*, hal. 35.

<sup>16</sup> Laporan Tahunan Periode 1994/1995, *op.cit.*, hal. 17.

Departemen Hak Asasi Manusia Amerika Serikat juga mempersiapkan laporan guna menghentikan hubungan Amerika Serikat dengan Turki. Sebagai hasil dari laporan tersebut Amerika Serikat membatalkan pengiriman kapal perang yang telah dibayar oleh Turki dan memaksa pemerintah Turki untuk meninjau kembali kebijakannya dalam pembelian helikopter tempur dari Amerika Serikat dalam jumlah yang besar. Karena Helikopter ini di tenggarai akan digunakan untuk menjaga kestabilan hubungan dengan negara-negara tetangganya di Timur Tengah.<sup>17</sup>

Tindakan Turki tersebut dipandang oleh para *decision makers* di Amerika Serikat sebagai sebuah kebijakan yang “sevres phobia”<sup>18</sup> yaitu ketakutan Turki terhadap direvisinya kembali perjanjian Sevres, perjanjian yang dibuat oleh kekuatan-kekuatan pemenang dalam Perang Dunia I untuk membagi propinsi Anatolia di masa kerajaan Ottoman menjadi beberapa negara kecil dan wilayah-wilayah jajahan. Kebijakan Amerika Serikat mengenai masalah HAM di Turki dan pengakuannya terhadap negara federasi Turki di Irak Utara seringkali dipandang dari sudut “sevres phobia” yang membuat Amerika Serikat terlihat sebagai musuh dibandingkan sebagai sekutu lama yang strategis.

Para *decision makers* di Amerika Serikat juga mempertimbangkan keuntungan dan kerugian atas hubungan Amerika Serikat dengan Turki. Hal ini dikarenakan:<sup>19</sup> Pertama, mereka seringkali melihat bahwasannya kebijakan HAM Amerika Serikat di Turki membuat Amerika Serikat kurang waspada terhadap beberapa kasus yang terjadi di Yugoslavia, Chechnya, Arab Saudi dan Afganistan. Kedua, mereka menemukan kegagalan dari pemerintah Amerika Serikat dalam menghalau munculnya isu mengenai ijin ekspor senjata Amerika Serikat kepada Turki yang digunakan untuk menyerang kekuatan terorisme dan PKK. Ketiga, keengganan dari para pemimpin Turki untuk tidak menggunakan kekuatan militer

---

<sup>17</sup> Kemal Kirisci, *Turkey and the United States...*, *op.cit.*, hal. 6.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hal. 7.

<sup>19</sup> *loc.cit.*

dalam mengatasi permasalahan Kurdi, membuat Amerika Serikat memberi pengakuan terhadap keberadaan Suku Kurdi.

Tarik menarik diplomasi terjadi diantara kedua negara. Amerika Serikat yang mendukung kelompok Front Kurdi bersatu di Irak Utara sebagai alat untuk menekan kekuatan Saddam Hussein, dengan Turki yang ingin memperlemah kekuatan pemberontak Kurdi. Turki beranggapan bahwa pendirian negara Kurdi dapat membahayakan integritas teritorial Turki.

Kebijakan Amerika Serikat terhadap suku Kurdi seringkali dianggap untuk memperlemah kekuatan Turki. Seorang pensiunan Kolonel Turki bahkan menyatakan bahwa: "Amerika Serikat dengan mengatasnamakan penegakan HAM telah membantu berdirinya negara Kurdi di Irak Utara dan mengajukan tuntutan atas wilayah yang menjadi bagian dari negara Turki".<sup>20</sup>

Namun pada dasarnya ketidaksenangan Turki terhadap kebijakan Amerika Serikat mengenai pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Turki, permasalahannya dengan Armenia, hubungan Turki dengan Cyprus dan Yunani berasal dari kegagalan pemimpin Turki dalam mengartikan peran kongres dan masyarakat sipil dalam pembuatan kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Seringkali pemimpin Turki kurang menyadari bahwasannya lembaga eksekutif Amerika Serikat tidak dapat mempengaruhi keputusan kongres dalam menentukan kebijakan luar negerinya dan juga lembaga-lembaga non-pemerintah yang dapat menekan pemerintah mengenai permasalahan-permasalahan HAM dan penjualan senjata.

Secara berlawanan, meluasnya tekanan terhadap demokrasi dan multikulturisme di Turki telah diikuti dengan meningkatnya pengaruh ajaran Islam kedalam kehidupan politik di Turki. Hal ini terlihat pada pembuatan kebijakan luar negeri Turki sepanjang masa pemerintahan Perdana Menteri Necmettin Erbakan.

---

<sup>20</sup> Loc. cit.

## **3.2 Orientasi Politik Luar Negeri Turki terhadap Amerika Serikat Pada Masa Pemerintahan Erbakan**

### **3.2.1 Latar Belakang dan Obsesi Erbakan**

Erbakan berasal dari keluarga yang terhormat, ayahnya Sheikh Muhammad Sobri adalah Kepala Peradilan Islam pada Zaman Imperium Ottoman dan semua kakeknya menjabat sebagai menteri pada Zaman Imperium Ottoman, karena itu ia dijuluki 'Erbakan' yang artinya menteri. Sebab ia keturunan para menteri.<sup>21</sup> Erbakan lahir pada tahun 1926 di desa Sinob, Turki bagian utara bertepi dengan Laut Hitam. Namun masa kecil dan remajanya dihabiskan di kota Qunieh Propinsi Anadolu, merupakan kota yang menjadi tujuan ziarah jutaan rakyat Turki karena terdapat kuburan wali Maulana Jalaluddin Ar Rumi.

Erbakan tidak bisa belajar ilmu-ilmu agama seperti yang diinginkan ayahnya, karena Attaturk telah menghapus semua sekolah-sekolah agama di Turki. Akhirnya Erbakan belajar teknik mesin di Universitas Istanbul hingga memperoleh gelar sarjana dengan nilai istimewa sebelum ia berusia 22 tahun. Karena kecerdasannya maka pemerintah Turki mengirimnya ke Jerman untuk melanjutkan studi pasca sarjana. Setelah lulus dengan menyandang gelar Doktor dibidang mesin dari Universitas Achen, pemerintah Jerman memintanya untuk menetap dan bekerja di negara tersebut. Tetapi Erbakan lebih memilih pulang ke Turki pada tahun 1961. Erbakan kemudian diangkat sebagai dosen fakultas teknik pada Universitas Istanbul. Pada tahun 1967, Erbakan diangkat sebagai direktur salah satu perusahaan terbesar di Turki yang bergerak di bidang mesin dan elektro yang kemudian menghantarkannya menjadi ketua kamar dagang dan industri.

Dunia politik baru dimasukinya pada tahun 1969 ketika ia mencoba mencalonkan diri menjadi anggota parlemen mewakili kotanya Qunieh, dan berhasil. Setahun kemudian, Erbakan mendirikan Partai Keteraturan Nasional yang menghendaki bangkitnya Islam di Turki. Namun kudeta militer tahun 1971,

---

<sup>21</sup> Kompas, 11 Juli 1996.

membubarkan pemerintahan sipil, parlemen dan parpol-parpol. Erbakan bersama dengan keluarganya mengasingkan diri ke Swiss. Dua tahun kemudian, militer Turki mengizinkan kembalinya pemerintahan sipil, parlemen dan parpol-parpol maka Erbakan pun kembali dari tempat pengasingannya dan mendirikan partai baru, Partai Keselamatan Nasional.

Pada tahun itu pula, Partai yang dipimpin Erbakan turut serta dalam pemilu dan berhasil memperoleh 49 kursi di parlemen. Perolehan kursi yang cukup banyak tersebut membuat Partai Republik Rakyat yang merupakan partai terbesar saat itu mengajaknya berkoalisi, meskipun sebenarnya kedua partai tersebut saling bermusuhan. Erbakan sendiri mengatakan, bahwa dunia politik tidak mengenal kata dendam abadi.<sup>22</sup>

Koalisi antara Partai Keselamatan Nasional dan Partai Republik Rakyat mengalami kegagalan. Kemudian muncullah Partai Keadilan yang dipimpin Suleyman Demirel dan mengajak Partai Keselamatan Nasional untuk berkoalisi. Namun adanya kudeta militer ditahun 1980 yang dilakukan oleh Jenderal Kenan Everent, menuduh para politisi sipil telah berbuat kotor dan curang membawa Erbakan dan Demirel ke penjara selama dua tahun.

Dikembalikannya lagi kehidupan politik sipil oleh militer membuat Erbakan mendirikan partai kembali dengan nama Partai Kesejahteraan atau Partai Islam Refah, meskipun ia belum bisa menjalankan hak-hak politiknya secara penuh sampai ada keputusan khusus dari Jenderal Everent.

Partai Islam Refah dibawah pimpinan Erbakan bercita-cita menciptakan kesejahteraan bagi rakyat Turki, terutama rakyat di Propinsi Anadolu tempat dimana Erbakan menghabiskan masa kecilnya, karena sampai saat ini Anadolu masih belum tersentuh industri. Sebagian rakyatnya bekerja sebagai penggembala dan petani. Hal itu juga digunakan Erbakan untuk menarik perhatian masyarakat menengah kebawah di Turki.

---

<sup>22</sup> Ibid.

Latar belakang Erbakan membuatnya menjadi seorang oposan terhadap kebijakan Turki yang cenderung pro Barat, dan mendukung kebangkitan Islam. Meskipun demikian, sebagai pemimpin partai yang berwarna Islam, Erbakan tidak seperti yang dibayangkan orang, ia tidak berjubah ataupun berikat kepala penampilannya seperti politisi sekuler lainnya. Bahkan dalam siaran televisi ia tampak bersalaman dengan Tansu Ciller<sup>23</sup>, seorang politisi sekuler wanita di Turki yang mendapat julukan *Iron Lady of Turkish Politic*.<sup>24</sup>

Obsesi Erbakan ingin membawa Turki memasuki babak baru dengan ciri baru yang menjunjung tinggi agama Islam sebagai rujukan utama dalam sistem pemerintahan. Melalui partainya Erbakan menyerukan adanya pembatasan hubungan dengan Amerika Serikat dan Uni Eropa, dan menyerukan ditingkatkannya hubungan Turki dengan negara-negara Islam di Timur Tengah, Asia Tengah, kawasan Balkan, Asia Selatan dan Asia Tenggara. Bahkan Erbakan berkeinginan meng-islamisasi PBB, NATO dan Uni Eropa.<sup>25</sup>

Erbakan juga memprakarsai terbentuknya D-8, kepanjangan dari Developing Eight yang beranggotakan delapan negara berkembang dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, yaitu Malaysia, Indonesia, Pakistan, Bangladesh, Mesir, Turki, Iran dan Nigeria.

### **3.2.2 Orientasi Politik Luar Negeri Erbakan *Islamic Oriented* ( meningkatkan hubungan Turki dengan negara-negara Islam )**

Semenjak resmi dilantik menjadi Perdana Menteri Turki pada tanggal 28 Juni 1996, Necmetin Erbakan secara bertahap merubah orientasi kebijakan luar negeri Turki yang pro Barat menjadi cenderung “melihat ke Timur” dengan merangkul negara-negara tetangga Turki yang pernah berseteru dengan Turki pada saat diperintah oleh rezim sekuler. Erbakan kemudian melakukan kunjungan

<sup>23</sup> Kompas, 10 Agustus 1996.

<sup>24</sup> Alan Makovsky, *Islamist Take Power...*, op.cit., hal. 2

<sup>25</sup> Turkey (Country), *op.cit.*

kenegaraannya secara bertahap ke Iran, Libya dan Irak yang membuat Amerika Serikat sebagai sekutu Turki di NATO cemas, karena Turki menjalin kerjasama bilateral dengan negara-negara yang menjadi musuh Amerika Serikat.

### 3.2.2.1 Hubungan Bilateral Turki dengan Iran

Kunjungan pertama Erbakan setelah resmi diangkat sebagai Perdana Menteri Turki adalah ke Iran, dengan membatalkan rencana kunjungan pejabat senior Israel ke Turki untuk membicarakan perjanjian kerjasama di bidang militer.<sup>26</sup> Sedangkan kunjungan Perdana Menteri Erbakan ke Iran adalah untuk menandatangani kesepakatan pembelian minyak dan gas senilai 23 Miliar Dolar AS dan kesepakatan pembangunan pipa di Turki dan Iran<sup>27</sup> yang digunakan untuk memasok gas ke Turki selama 20 tahun. Pengiriman dilakukan sedikitnya 4 miliar meter kubik gas per tahun.

Kesepakatan bilateral antara Turki dengan Iran ini mendapatkan kecaman dari sekutu utama Turki di Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO), Amerika Serikat, yang mengisolasi Iran dengan embargo ekonomi, karena Iran dituduh mensponsori terorisme internasional. Bahkan Amerika Serikat meratifikasi undang-undang anti Iran dan Libya yang ditandatangani oleh Presiden Bill Clinton yang memberi kewenangan kepada Amerika Serikat untuk menjatuhkan hukuman kepada perusahaan non-Amerika Serikat yang menanamkan modalnya di kedua negara tersebut lebih dari 40 Juta Dolar AS selama setahun.<sup>28</sup>

Namun Turki melihatnya sebagai kesepakatan bilateral, bukan investasi. Pembangunan pipa untuk menyalurkan gas dari Iran dianggap sebagai investasi di wilayah Turki sendiri, sehingga tidak bisa menjadi subjek dari undang-undang baru Amerika Serikat.

---

<sup>26</sup> Alan Makovsky, *United State Relation with Erbakan's Turkey*, *op.cit.*, hal 1.

<sup>27</sup> Setia Budi HP, *op.cit.*, hal. 1.

<sup>28</sup> *Loc.cit.*

### 3.2.2.2 Menjalin Hubungan Bilateral dengan Libya

Perdana Menteri Erbakan melanjutkan kunjungannya ke Libya, untuk mengadakan perundingan dengan pemimpin Libya, Moammar Khadafy, guna meningkatkan kerjasama dibidang ekonomi antara Ankara-Tripoli.

Tindakan Erbakan menjalin hubungan dengan Libya tentu saja menentang sikap Amerika Serikat dan kubu oposisi (sekuler) di Turki. Erbakan bahkan mendesak agar sanksi-sanksi PBB “yang tidak adil” terhadap Libya dengan tuduhan mendukung terorisme diakhiri.<sup>29</sup>

Kubu oposisi Turki menuduh Erbakan terlalu bersemangat berunding dengan negara-negara yang dianggap musuh Amerika Serikat karena mendukung terorisme. Washington pun memperingatkan Ankara setelah kunjungannya ke Iran dan terhadap upaya normalisasi hubungannya dengan Libya.

Apalagi sikap pemimpin Libya, Moammar Khadafy yang mengecam Turki karena menjalin hubungan bilateral dengan Israel dan pernyataan Khadafy yang mendukung usaha pembentukan negara Kurdi, suatu hal yang dianggap tabu bagi Turki yang sudah menghadapi separatis Kurdi selama 12 tahun. Khadafy juga menghina pemerintahan Turki yang lebih cenderung pro terhadap Barat dengan menjuluki Turki sebagai sebuah negara di bawah pendudukan Barat. Hal ini dikarenakan status Turki sebagai anggota NATO dan menjalin hubungan bilateral dengan Amerika Serikat.<sup>30</sup>

Pernyataan Kadhafy tersebut dijadikan sebagai modal bagi kubu oposisi untuk dieksploitasi guna menjatuhkan pemerintahan Erbakan melalui mosi tidak percaya terhadap pemerintahan koalisi. Erbakan dituduh telah melakukan tindakan yang tidak bertanggung jawab dalam menghadapi kelancangan Khadafy, meskipun pada tanggal

---

<sup>29</sup> Kompas, 7 Oktober 1996.

<sup>30</sup> Alan Makovsky, *Turkey: Erbakan at Six Month, dalam Policywatch*, 29 Juli 1996, hal. 1, ([www.washingtoninstitute.org/watch/policywatch/policywatch1996/230.htm](http://www.washingtoninstitute.org/watch/policywatch/policywatch1996/230.htm), diakses pada 5 Mei 2003).

7 Oktober 1996 ia telah memanggil pulang Duta Besarnya untuk Libya sebagai protes atas pernyataan Khadafy tersebut.

Kunjungan Erbakan ke Libya dianggap pemerintah Turki sebagai “skandal diplomasi” dan menyimpang dari tradisi kebijakan luar negeri Turki. Apalagi Turki selama ini tidak pernah mengalami situasi yang memalukan itu.<sup>31</sup>

Upaya oposisi untuk menggulingkan pemerintahan Erbakan melalui mosi tidak percaya mengalami kegagalan. Juru bicara parlemen, Uluc Gurkam menyatakan bahwa 265 anggota parlemen dari 550 kursi di parlemen Turki mengajukan mosi tidak percaya atas berbagai kebijakan Erbakan. Namun upaya mereka berhasil dihambat oleh 278 suara anggota lainnya yang mendukung kebijakan yang dibuat oleh perdana menteri dari Partai Refah yang berhaluan Islam.<sup>32</sup>

### 3.2.2.3 Menjalin Hubungan Bilateral dengan Irak

Dengan modal kemenangan atas mosi tidak percaya yang diajukan oleh kubu oposisi, Perdana Menteri Erbakan semakin memantapkan orientasi kebijakan luar negerinya ke Timur. Erbakan menegaskan keinginannya untuk menjalin hubungan perdagangan dengan Irak, salah satu “musuh” utama Amerika Serikat, untuk mendongkrak perekonomian nasional Turki.

Kunjungan wakil Perdana Menteri Irak Tareq Aziz pada 12 November 1996 ke Ankara setelah setelah lawatannya ke Moscow merupakan kunjungan pertama Aziz sejak 1991. Kedua negara sepakat untuk meningkatkan perdagangan dan membuka kembali jaringan pipa yang terbentang dari ladang-ladang minyak Irak ke pelabuhan Turki. Aliran minyak yang melalui pipa tersebut terhenti sejak PBB menjatuhkan sanksi atas Irak akibat invasinya ke Kuwait pada tahun 1990. Turki ingin menghidupkan kembali perdagangannya dengan Irak, khususnya setelah Irak

---

<sup>31</sup> Republika, 10 Oktober 1996.

<sup>32</sup> Republika, 18 Oktober 1996.

menandatangani Pakta PBB yang mengizinkan Irak menjual sebagian minyaknya untuk membeli makanan dan obat-obatan dengan pengawasan PBB.<sup>33</sup>

Dalam pertemuan antara Tareq Aziz dengan Menteri luar Negeri Tansu Ciller, Aziz mendesak Turki agar bertindak melawan campur tangan Amerika Serikat di Irak Utara. Ciller sendiri mengatakan bahwa Turki terus mendukung integritas territorial dan kedaulatan Irak.<sup>34</sup>

### 3.2.3 Orientasi Politik Luar Negeri Erbakan Anti Amerika Serikat

Turki modern yang didirikan oleh Mustafa Kemal Pasha dengan semangat Tanzimat<sup>35</sup> (reformasi) mencari jati dirinya dengan meninggalkan monarki Islam, sehingga Attaturk menjadi simbol pemersatu dan kemodernan Turki. Namun memasuki abad ke-21 ini, Turki kembali mengalami krisis identitas. Dengan kondisi perekonomiannya yang tidak lebih baik dari negara-negara Eropa yang menjadi kiblatnya, ditambah munculnya “naga-naga baru” di Asia Timur. Untuk itu Turki berharap agar dapat menjadi anggota penuh Uni Eropa untuk memperbaiki kondisi perekonomiannya.

Krisis identitas -antara Eropa yang sudah mulai surut dengan kebangkitan Asia- menyebabkan bangsa Turki semakin terbebani. Masa kekhalifahan Utsmani yang masyhur tidak bisa diangkat kembali sehingga terjadi pro dan kontra antara untuk berpaling ke Eropa (Barat) atau perlahan-lahan mencari identitas dari negara-negara muslim-baik negara-negara Arab maupun Asia seperti Malaysia dan Indonesia yang ekonominya sudah berkembang.

Kebesaran Ottoman secara samar-samar mulai muncul. Negara-negara Barat sendiri merasa ketakutan akan kehilangan “anak angkatnya”, karena ternyata masih memiliki kesadaran untuk kembali kepangkuan ideologi “kandungnya” merupakan

---

<sup>33</sup> *Republika*, 14 November 1996.

<sup>34</sup> *Loc cit.*

<sup>35</sup> Tanzimat yaitu usaha-usaha untuk memperbarui struktur kehidupan umum Utsmani dan menciptakan sentralisasi pemerintahan yang lebih efektif, dalam John Obert Voll, *Op Cit.*, hal. 128.

sebuah pukulan telak bagi para pendukungnya yang telah berusaha selama puluhan tahun ingin mencabut akar Islam dari kehidupan masyarakat Turki. Apalagi 99 % dari 63 juta penduduk Turki beragama Islam meskipun dalam kehidupan sehari-hari mereka masih cenderung ke arah sekuler. Hiburan khas Barat, minuman dan gaya Eropa lainnya merupakan simbol kemodernan Turki.

Ketidakpuasan dalam masyarakat mendorong Refah mencoba menawarkan program-program untuk berpaling ke Timur atau kembali ke nilai-nilai Islam daripada ke Eropa.<sup>36</sup>

### 3.2.3.1 Erbakan Menjauhi Uni Eropa

Perdana Menteri Erbakan merubah orientasi kebijakan luar negeri Turki yang selama ini selalu berada di bawah bayangan dunia Barat. Apalagi upaya dari rezim sekuler selama 30 tahun untuk mendapatkan status keanggotaan penuh di Uni Eropa mengalami kegagalan, maka Erbakan mengesampingkan hubungan Turki dengan Uni Eropa. Usaha penolakan terhadap keanggotaan Turki dilakukan dengan berbagai alasan, seperti permasalahan pelanggaran HAM terhadap Suku Kurdi dan kondisi perekonomian Turki yang masih belum stabil, meskipun Turki merupakan anggota NATO dan negara sekuler.

Negara-negara anggota Uni Eropa bersikap 'diskriminatif' terhadap Turki karena mereka melihat dari sudut budaya, etnis dan lebih khusus lagi dari sudut keagamaan sehingga mereka lebih senang jika Turki hanya sebagai *out sider* bukan anggota penuh. Dengan mayoritas ( 99 % ) penduduk Turki beragama Islam maka sangat logis apabila Uni Eropa lebih memilih negara-negara seperti Swedia dan Skandinavia juga Yunani.<sup>37</sup>

Bahkan, Presiden Prancis Valery Giscard d'Estaing mengatakan jika Turki menjadi anggota Uni Eropa maka akan terjadi "the end of Europe", karena budaya

---

<sup>36</sup> Kompas, 10 Agustus 1996.

<sup>37</sup> Turkey Entry 'Would destroy Uni Eropa', dalam [www.bbcnews.htm](http://www.bbcnews.htm), diakses pada 5 Mei 2003.

Turki dan letak geografisnya, dimana ia mengatakan bahwa 95% penduduk Turki tinggal di luar Eropa, bahkan ibukota Turki juga tidak terletak di Eropa sehingga Turki bukan merupakan bagian dari Eropa, meskipun Turki merupakan anggota dari "Council of Europe", OECD dan NATO.<sup>38</sup>

Hal tersebut membuat Perdana Menteri baru Turki Necmettin Erbakan yang berasal dari partai Islam berupaya merubah arah kebijakan luar negeri Turki yang selama ini berada di bawah bayangan dunia Barat. Bahkan elemen primodialisme Islam dijadikan sebagai nilai tambah dalam mendapatkan akses ekonomi ke dunia Islam. Menurut Erbakan, negara-negara Islam mampu berdiri bila mempunyai keinginan untuk membentuk kerjasama dan mampu bersikap mandiri serta mempunyai peran di lingkungan internasional sehingga tidak menjadi 'budak' dari kepentingan Barat.<sup>39</sup>

### 3.2.3.2 Erbakan Menjauhi NATO

Politik luar negeri Turki selama ini pro Barat bertujuan untuk mendapatkan stabilitas dalam negeri, keamanan dari ancaman negara-negara lain dan untuk memperlancar pembangunan ekonomi disamping untuk mempercepat proses westernisasi. Hal tersebut merupakan salah satu alasan bagi Turki untuk bergabung dengan Organisasi Pertahanan Atlantik Utara (NATO). Selama diperintah oleh rezim sekuler, Turki merupakan satu-satunya anggota NATO yang berpenduduk mayoritas muslim dengan loyalitas dan dedikasi yang tinggi. Turki resmi menjadi anggota NATO pada 1 Agustus 1952.

Namun dengan tampilnya Erbakan sebagai perdana menteri, dimana Erbakan berkeinginan membentuk kerjasama semacam NATO dan PBB khusus bagi negara-negara Islam sehingga Erbakan berusaha mengurangi peranan Barat di Turki.

---

<sup>38</sup> *Turki Entry 'would destroy Uni Eropa'*, dalam [www.bbcnews.htm](http://www.bbcnews.htm), diakses pada 5 Mei 2003.

<sup>39</sup> *Kompas*, 14 Juni 1997.

Erbakan bahkan mengatakan, “Baik NATO maupun PBB kini sudah terlalu diwarnai AS, jadi ikut keduanya ya sama saja dengan ikut AS”.<sup>40</sup>

Pernyataan tersebut dianggap Barat telah membangkitkan fundamentalisme yang sering disamakan dengan “terorisme” dalam perspektif Barat. Hal tersebut membuat salah satu surat kabar terkemuka di Amerika Serikat menulis tajuknya dengan judul “Islam masuk NATO” karena Turki yang merupakan anggota NATO kini dikuasai Partai Refah. Hal senada juga dilontarkan oleh Sekretaris Jenderal NATO William Claes “ancaman sesungguhnya bagi Eropa (setelah komunis jatuh) adalah Islam”. Untuk itu dalam setiap latihan tempur pasukan NATO musuh disimbolisasikan dengan warna hijau untuk menggantikan warna merah.<sup>41</sup>

### 3.2.3.3 Erbakan menjauhi Israel

Kemenangan Partai Islam Refah pada bulan Desember 1995 membuat cemas Israel, karena Refah mempunyai pandangan yang buruk terhadap Israel dan menganggap Zionisme sebagai sumber segala penyakit yang menimpa dunia, terutama terhadap menurunnya kondisi perekonomian negara-negara Islam.<sup>42</sup> Untuk itu Israel meminta kepada partai-partai sekuler agar mengawasi setiap langkah yang dilakukan Partai Refah. Refah juga menyatakan bahwa partainya akan membatalkan perjanjian militer antara Turki dengan Israel. Dan apabila hal tersebut terjadi maka hubungan kedua negara akan membeku.

Perjanjian dibidang militer tersebut berisi kesepakatan untuk menggelar latihan bersama dengan Angkatan Udara dan Angkatan Laut Israel. Kesepakatan tersebut ditandatangani pada tanggal 23 Februari 1996. Bahkan pada bulan Maret

<sup>40</sup> *Membingkai Masa Depan Turki*, *Islah*, Edisi 56/IV, 1996, hal. 88.

<sup>41</sup> *Menjelang Pemilu Nasional*, *Islah*, No. 39/III, III 1995.

<sup>42</sup> Sencer Ayata, *Politics and Religion in Post-Election Turkey*, hal. 1, ([www.washingtoninstitute.org/watch/policywatch/policywatch](http://www.washingtoninstitute.org/watch/policywatch/policywatch) 1996/198.htm, diakses pada 12 September 2002).

Presiden Demiral melakukan kunjungan ke Israel untuk mengadakan perjanjian mengenai perdagangan bebas.<sup>43</sup>

Di bawah perjanjian tersebut maka Turki dan Israel akan tukar menukar personel dan adanya kebebasan saling berkunjung di pangkalan masing-masing, dan Turki memberikan ijin kepada Israel untuk memasang radar penerbangan di sepanjang perbatasan Turki dengan Iran, Irak dan Syria. Kerjasama tersebut dilakukan untuk melawan terorisme, bangkitnya fundamentalisme Islam dan ketegangan di perbatasan, Israel.<sup>44</sup>

Naiknya Erbakan sebagai Perdana Menteri Turki pada 28 Juni 1996 membuat Israel semakin cemas mengingat dalam kampanye pemilu, Erbakan berkeinginan menghentikan hubungan Turki dengan Israel dan mengatakan bahwa partainya adalah lawan dari Zionisme dan negara Yahudi. Namun dua bulan setelah Erbakan menduduki kursi perdana menteri, Turki dan Israel melengkapai kesepakatan bantuan Israel sebesar 650 Miliar Dolar AS, yaitu bantuan modernisasi pesawat tempur Turki F-4 Panthom dengan menggunakan teknologi tinggi oleh *Israeli Aircraft Industries*. Perdana Menteri Erbakan menandatangani kesepakatan tersebut pada tanggal 8 Desember 1996 dibawah tekanan keras militer.<sup>45</sup>

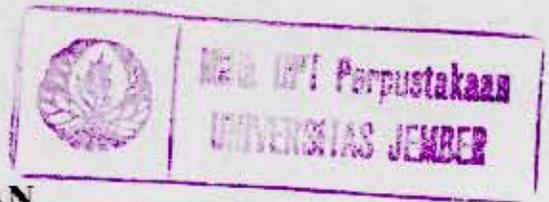
Memang terlihat kebijakan Turki dalam menghadapi Israel adalah suatu paradoks, dimana di satu sisi Erbakan membawa Turki kearah Timur (Islam), tetapi disisi lain justru mengancam negara-negara di "Timur" dengan berhubungan erat dengan lawan utama negara-negara Islam yaitu Israel. Hal ini dapat dipahami, karena militer di Turki amatlah berpengaruh terhadap kehidupan politik apabila Erbakan menolak untuk menandatangani kesepakatan tersebut, maka tidak menutup kemungkinan terjadinya kudeta militer.

---

<sup>43</sup> Alan Makovsky, *Turkey and "The Refah Problem*, hal.1, ([www.washingtoninstitute.org/watch/policywatch/policywatch\\_1996/204.htm](http://www.washingtoninstitute.org/watch/policywatch/policywatch_1996/204.htm), diakses pada 12 September 2002).

<sup>44</sup> Alan Makovsky, *Turkish Israeli Cooperation, The Peace Process, and The Region*, hal.1, ([www.washingtoninstitute.org/watch/policywatch/policywatch1996/195.htm](http://www.washingtoninstitute.org/watch/policywatch/policywatch1996/195.htm), diakses pada 5 Mei 2003).

<sup>45</sup> *Loc.cit*.



## BAB V KESIMPULAN

Perkembangan kehidupan politik di Turki mengalami kondisi krisis sejak jatuhnya pemerintahan koalisi pimpinan Tansu Ciller dari Partai Jalan Kebenaran. Apalagi Presiden Suleyman Demirel mengalami kesulitan untuk mendapatkan tokoh yang layak sebagai perdana menteri, maka Presiden meminta Ciller menjadi pejabat sementara perdana menteri guna mengisi kekosongan dan untuk segera membentuk pemerintahan koalisis pada bulan Oktober 1995. Tetapi hanya 10 hari berkuasa pemerintahan baru Ciller jatuh oleh mosi tidak percaya sebagai dampak dari aksi protes kaum buruh dan isu korupsi.

Ditengah krisis politik yang disertai dengan krisis ekonomi, isu korupsi yang dilakukan oleh pejabat sekuler telah membuat ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintahan sekuler. Untuk itu pada saat pemilu yang dipercepat satu tahun pelaksanaannya, yaitu pada tanggal 24 Desember 1995, Partai Refah sebagai satu-satunya partai Islam di Turki memenangkan suara dalam pemilu tersebut. Meskipun tidak sampai meraih kemenangan mayoritas kursi parlemen, kemenangan Refah merupakan sesuatu yang fenomenal dalam peta politik Turki. Apalagi selama tujuh dasawarsa Turki didominasi oleh partai-partai yang berhaluan sekuler sehingga rakyat merasa jenuh dan menginginkan sebuah suasana baru yang akan membawa kondisi Turki menjadi lebih baik

Kemenangan tersebut membawa Necmettin Erbakan, pemimpin Partai Islam Refah, sebagai Perdana Menteri Turki. Sebelumnya kubu sekuler telah berusaha menjegal langkah Erbakan dengan membentuk koalisi sekuler (Partai Tanah Air-Partai Jalan Kebenaran). Namun koalisi yang terpaksa dibangun tersebut tidak bertahan lama karena adanya pertentang pribadi diantara kedua pemimpinnya.

Erbakan sebagai pendiri Partai Refah mempunyai orientasi politik luar negeri yang cenderung pro Timur dan Anti Barat, Anti Amerika Serikat dan anti Zionist.

Faktor-faktor yang mendasari orientasi Erbakan untuk cenderung melihat ke Timur, selain karena kepribadian dan latar belakang yang berasal dari keluarga Islami keturunan para menteri pada Zaman Ottoman juga karena memburuknya kondisi dalam negeri Turki dan sikap diskriminatif negara-negara Barat terhadap Turki sebagai negara dengan mayoritas penduduknya Muslim.

Seperti yang dikampanyekan dalam pemilu, yaitu akan menerapkan sistem ekonomi keadilan, memperkecil peranan Barat, dan membentuk tata dunia Muslim semacam PBB dan NATO khusus bagi negara-negara Islam, maka Perdana Menteri Erbakan secara bertahap mengubah orientasi kebijakan luar negeri Turki dengan menjalin hubungan bilateral dengan negara-negara Islam seperti Iran, Libya dan Irak yang pernah berseteru dengan Turki pada saat diperintah oleh rezim sekuler dan merupakan musuh dari Amerika Serikat. Tindakan Erbakan tersebut membuat Amerika sebagai sekutu utama Turki di NATO cemas, karena Turki yang diharapkan sebagai kekuatan penyangga kepentingan dan pengaruh Amerika Serikat di Timur Tengah selain Israel justru menunjukkan tanda-tanda anti klimaks dan lebih cenderung pro Islam. Untuk itu lembaga perbankan AS menolak merekomendasikan bantuan untuk Turki yang bernilai nominal lebih dari 10 Juta Dollar AS.

Militer Turki yang melegitimasi dirinya sendiri sebagai penjaga negara sekuler Turki berusaha menekan kebijakan pemerintahan Erbakan, apalagi kebijakan yang dibuat oleh Erbakan ke dalam negeri seperti adanya kebebasan pemakaian jilbab, pendirian masjid-masjid dan sebagainya telah membuat suasana Turki menjadi lebih Islami. Keadaan ini membuat militer merasa khawatir akan kehilangan akses politiknya. Tekanan dan reaksi militer atas tindakan Erbakan menyebabkan Erbakan mengundurkan diri dari kursi perdana menteri sebelum terjadi kudeta militer, karena militer Turki telah melakukan kudeta sebanyak tiga kali.

Pemerintahan yang belum genap berumur satu tahun tersebut pada akhirnya harus mundur, dan perubahan orientasi politik luar negeri yang dilakukan oleh Erbakan belum memberikan hasil yang nyata dan berarti bagi rakyat Turki. Apalagi ketidakstabilan politik tersebut membuat kondisi ekonomi Turki semakin memburuk

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku:

- Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam, Dari Fundamentalisme, Modernisme, hingga Post Modernisme*, Paramadina, Jakarta, 1996.
- Bantarto Bandoro (penyunting), *Agenda dan Penataan Keamanan di Asia Pasifik*, Centre for Strategic and International Studies, Jakarta, 1996.
- , *Timur Tengah Pasca Perang Teluk Dimensi Internal dan Eksternal*, CSIS, Jakarta, 1991.
- Bernard Lewis, *Bahasa Politik Islam*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994.
- Bahr, Lauren. S, Bernard Johnston, *Collier's Encyclopedia*, No. 22, PF Collier, USA, 1994.
- Coplin, William. D, *Politik Internasional: Suatu Telaah Teoritis*, CV. Sinar Baru, Bandung, 1992.
- Davidson, Roderic. H, *Turkey, The Modern Nations in Historical Perspective*, Prenticehall inc., Englewood, New Jersey, 1968.
- Esposito, John L., *Ancaman Islam: Mitos atau Realitas*, Penerbit Mizan Bandung, 1994.
- Esposito, John L. & John O. Voll, *Demokrasi Di Negara-negara Muslim Problem dan Prospek*, Penerbit Mizan, Bandung, 1999.
- George Lenczowski, *Timur Tengah di Tengah Kancah Dunia*, Sinar Baru Algesindo, Bandung, 1992.
- Guillermo O'Donnell, Philippe C. Schmitter, Laurence Whitehead, *Transisi Menuju Demokrasi Kasus Eropa Selatan*, LP3ES, Jakarta, 1992.
- Huntington, Samuel. P, *Benturan Antarperadaban dan Masa Depan Politik Dunia*, Penerbit Qalam, Yogyakarta, 2001.
- John Obert Voll, *Politik Islam, Kelangsungan dan Perubahan*, Titian Illahi Pers, Yogyakarta, 1997.

- Holsti, K.J. *Politik Internasional: Kerangka Untuk Analisa*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1988.
- Kedourie, Sylvia, *Turkey Identity, Democracy and Politics*, Frank Cass, London, 1996.
- Lentner, Howard. H, *International Politics: Theory and Practice*, West Publishing Company, New York, 1997.
- Macridis, Roy. C, Bernard E. Brown, *Perbandingan Politik Catatan dan Bacaan*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1992.
- May Rudi, *Studi Strategis dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2002.
- Mohtar Mas'oe'd, *Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi*, LP3ES, Jakarta, 1994.
- Mohtar Mas'oe'd, *Studi Hubungan Internasional: Tingkat Analisis dan Teorisasi*, PAU-UGM, Yogyakarta, 1989.
- Nisbet, Robert. A, *The Social Bond on Introduction to the Study of Society*, Koff, New York, 1979.
- Plano, Jack. C, R.E. Riggs & H.S. Robin, *Kamus Analisa Politics*, CV Rajawali, Jakarta, 1985.
- Riza Sihbudi (penyunting), *Profil Negara-negara Timur Tengah*, PT Dunia Pustaka Jaya, Jakarta, 1995.
- Sidik Jatmika, *AS Penghambat Demokrasi: Membongkar Politik Standar Ganda Amerika Serikat*, BIGRAF Publishing, Yogyakarta, 2000.
- Sufri Yusuf SH, *Hubungan Internasional dan Politik Luar Negeri: Sebuah Analisis Teoritis dan Uraian Tentang Pelaksanaannya*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1989.
- Tulus Warsito, *Teori-teori Politik Luar Negeri Relevansi dan Keterbatasannya*, BIGRAF Publishing, Yogyakarta, 1998.
- Zainuddin Djafar (penyunting), *Perkembangan Studi Hubungan Internasional dan Tantangan Masa Depan*, PT Dunia Pustaka Jaya, Jakarta, 1996.

*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Badan Penerbit UNEJ, Jember, 1998.

**Penerbitan Lembaga Pemerintah:**

Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, *Laporan Tahunan Kedutaan Besar Republik Indonesia- Turki*, Periode 1990/1991.

-----, Periode 1991/1992.

-----, Periode 1992/1993.

-----, Periode 1993/1994.

-----, Periode 1994/1995.

-----, Periode 1995/1996.

**Surat Kabar dan Majalah:**

Kompas, 29 April 1997.

-----, 11 Juli 1997.

Kompas, 11 Juli 1996.

-----, 10 Juni 1996.

-----, 9 Februari 1996.

-----, 10 Agustus 1996.

-----, 7 Oktober 1996.

-----, 12 Oktober 1996.

-----, 14 Juni 1997.

-----, 10 Juli 1996.

-----, 11 Januari 1996.

-----, 3 Maret 1996.

-----, 26 April 1996.

-----, 11 Mei 1996.

-----, 8 Juni 1996.

-----, 7 Juni 1996.

-----, 9 Juli 1996.

-----, 2 Juli 1996.

Republika, 1 Februari 1997.

-----, 10 Oktober 1996.

-----, 18 Oktober 1996.

-----, 14 November 1996.

Suara Merdeka, 27 Agustus 1996.

Ishlah, No.62/Thn. IV, 1996.

-----, No. 39/Thn. III, 1995.

-----, No. 56/Thn. IV, 1996.

Ummat, No. 2 Tahun II, 22 Juli 1996.

Intihlaq, No. 6 Tahun II, 29 April 1994.

Newsweek, 28 April 1997.

**Situs-Situs Internet:**

<http://www.washingtoninstitute.org/media/amakovsky/alansais.htm> Alan Amakovsky, "The New Activism in Turkish Foreign Policy", dalam SAIS Review, Winter-Spring 1996.

<http://www.washingtoninstitute.org/pubs/intro/turkintro.htm> Alan Makovsky and Sabri Sayari, eds, "Turkey's New World Changing Dynamics in Turkey Foreign Policy", 1996.

<http://www.washingtoninstitute.org/watch/206.htm> Alan Makovsky, "Islamist Take Power in Turkish Coalition", dalam *Policywatch Journal*, June 28, 1996, Number 206.

<http://www.washingtoninstitute.org/watch/213.htm> Alan Makovsky, "U.S. Relations With Erbakan's Turkey", dalam *Policywatch Journal*, August 8, 1996, Number 213.

<http://www.washingtoninstitute.org/watch/198.htm> DR. Sencer Ayata, "Politics and Religion in Post-Election Turkey", dalam *Special Policy Forum Report Policywatch Journal*, May 9, 1996, Number 198.

<http://www.washingtoninstitute.org/watch/204.htm> Alan Makovsky, "Turkey and 'The Refah Problem'", dalam *Policywatch Journal*, June 19, 1996, Number 204.

<http://www.washingtoninstitute.org/watch/384.htm> Alan Makovsky, "Turkey Nasionalist Moment", dalam *Policywatch Journal*, April 20, 1999, Number 384.

<http://www.washingtoninstitute.org/watch/195.htm> Alan Makovsky, "Turkish/Israeli Cooperation, The Peace Process, and the Region", dalam *Policywatch Journal*, 1996, Number 195.

<http://www.washingtoninstitute.org/watch/239.htm> Alan Makovsky, "Erbakan On The Ropes", dalam *Policywatch Journal*, 1996, Number 239.

<http://www.washingtoninstitute.org/watch/230.htm> Alan Makovsky, "Turkey: Erbakan at Six Months", dalam *Policywatch Journal*, 1996, Number 230.

<http://www.washingtoninstitute.org/watch/209.htm> Alan Makovsky and Ian Lesser, "Erbakan's Turkey: An Early Assessment", dalam *Policywatch Journal*, July 29, 1996, Number 209.

<http://meria.idc.ac.il/journal/1998/issue4/kirisici.pdf> Kemal Kirisci, "Turkey and United States: Ambivalent Allies", dalam *Middle East Review of International Affairs Vol. 2, No. 4 (December 1998)*.

<http://www.mfa.gov.tr> *Republic of Turkey Ministry of Foreign Affairs*.

<http://www.mfa.gov.tr/groupe/ca/cag/1142.htm> "Constitution of the Republic of Turkey", dalam *Republic of Turkey Ministry of Foreign Affairs*.

<http://www.mfa.gov.tr/groupa/default.htm> "Turkish Foreign Policy", dalam *Republic of Turkey Ministry of Foreign Affairs*.

<http://www.mfa.gov.tr/groupe/cc/ccf/b6.htm> "Defense and Security", dalam *Republic of Turkey Ministry of Foreign Affairs*.

<http://www.mfa.gov.tr/groupe/cc/ccd/B3f.htm> "The Election System", dalam *Republic of Turkey Ministry of Foreign Affairs*.

<http://www.mfa.gov.tr/groupe/ca/cae/d3.htm> "Religion and Secularism", dalam *Republic of Turkey Ministry of Foreign Affairs*.

<http://www.mfa.gov.tr/groupe/cb/cbe/d1.htm> "Government & Politics", dalam *Republic of Turkey Ministry of Foreign Affairs*.

<http://www.washington-report.org/backissues/1096/9610028.htm> James M. Dorsey, "Erbakan Striking Balance Between Islamic Neighbours and Secular Army", dalam *Washington Report Talking Turkey*, October 1996, pg. 28.

<http://www.rand.org/publications/MR/MR1241/> Zalmay Khalilzai, Ian O. Lesser, F. Stephen Larrabee, "The Future of Turkish-Western Relation: Toward a Strategic Plan", dalam *RAND'S National Security Research Division conducts*.

<http://www.bbcnews.htm> "Turkey Entry 'Would Destroy Uni Eropa'", dalam *BBC News*.

<http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/tu.html> "Turkey", dalam *The World Factbook 2002*.

<http://www.sfcg.org/Bulletin/Bul22/focus22.htm> "FOKUS: Islam and Turkey-The Regional Impact".

<http://www.biu.ac.id/soc/besa/publications/mfa3.html> Philip Robins, "Turkish Foreign Policy".

<http://www.meforum.org/article/35.htm> Alan Makovsky, "How to Deal with Erbakan", dalam *The Middle East Quarterly*, March 1997, Volume IV: Number 1.



**SEKRETARIAT BADAN PENKAJIAN DAN  
PENGEMBANGAN KEBIJAKAN**

BADAN PENKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DEPARTEMEN LUAR NEGERI  
JLN TAMAN PEJAMBON NO. 4 (EX. BP 7)  
JAKARTA PUSAT

---

**SURAT KETERANGAN RISET**

NOMOR: 32/ RJS/PERPUST/1/2003/68

Menunjuk Surat Pengantar Riset Nomor : 017/J25.3.1/PL.5/2003 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

Bersama ini kami menerangkan bahwa :

Nama : Dewi Retno Wulandari  
NIM : 98- 1100  
Jurusan : Hubungan Internasional

Telah mengadakan riset/penelitian di Perpustakaan BPPK Departemen Luar Negeri Jakarta selama 2 (dua) hari dengan judul :

**“ POLITIK LUAR NEGERI TURKI TERHADAP AMERIKA SERIKAT PADA MASA PEMERINTAHAN PM. NECHMETIN ERBAKAN. “**

Demikianlah Surat Keterangan ini kami berikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta , 22 Januari 2003

A.n. Kepala Bag. Perpust. Dok. dan

Perbitan.

Ka. Bag. Perpustakaan.





**CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES**

**SURAT KETERANGAN PELAKSANAAN RISET**

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

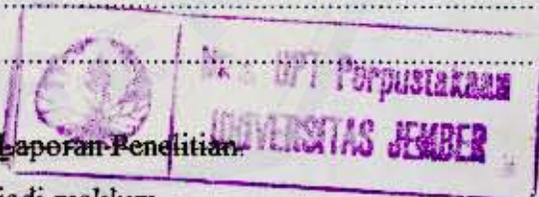
1. DEWI RETNO WULANDARI .....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....
6. ....
7. ....

Telah melaksanakan riset / survey pada

Perpustakaan Centre for Strategic and International Studies (CSIS)

dalam bidang :

PERUBAHAN POLITIK LUAR NEGERI TURKI TERHADAP  
 AMERIKA SERIKAT PADA MASA PEMERINTAHAN PERDANA  
 MENTERI NECMETTIN ERBAKAN



Untuk keperluan penyusunan Skripsi / Laporan Penelitian

Demikian agar yang bersangkutan menjadi maklum

Jakarta, 22 JANUARI 2003

*Maria Margrith Tirtasari*

**Maria Margrith Tirtasari**

Pustakawan